

99

UNIVERSITAS HASANUDDIN



GERAKAN BURUH DI MAKASSAR 1946 - 1955

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Sastra

Oleh :

SARKAWI

Nomor Pokok : 8907080

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN

Tgl. terima: 30-06-94

No. 1

2 (dua) eks

Arbab

951702 97

No. 111

FAKULTAS SASTRA UNHAS

UJUNG PANDANG

1994

UNIVERSITAS HASANUDDIN

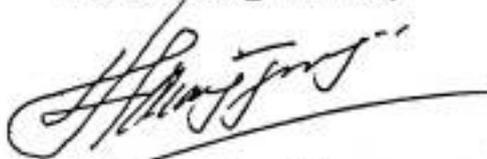
FAKULTAS SASTRA

HALAMAN PENGESAHAN

Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor: 3202/PT04.H5.FS/C/1993, tanggal 17 Desember 1993, dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui skripsi ini.

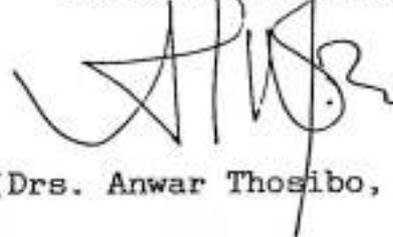
Ujungpandang, April 1994

Pembimbing Utama,



(Dr. Edward L. Poelinggomang)

Pembantu Pembimbing,



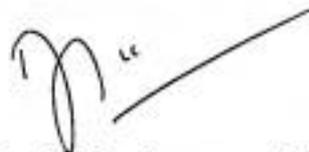
(Drs. Anwar Thosibo, M.Hum)

Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Ujian Skripsi

Dekan,

u.b. Ketua Jurusan Sejarah dan Arkeologi



(Drs. Daud Limbugau, S.U.)

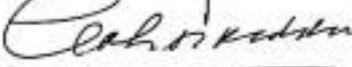
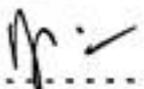
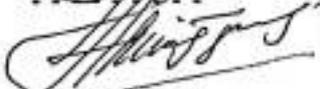
UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS SASTRA

Pada hari ini, Sabtu 16 April 1994, Tim Penguji menerima dengan baik skripsi yang berjudul: GERAKAN BURUH DI MAKASSAR 1946-1955, yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Sejarah, pada Jurusan Sejarah dan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Ujungpandang, 16 April 1994

TIM PENGUJI

1. Prof. Dra. Ny. Marrang, P. MS.	Ketua	
2. Drs. Baharuddin Batalipu	Sekretaris	
3. Drs. Daud Limbugau, S.U.	Penguji I	
4. Drs. Bambang S, M.Hum.	Penguji II	
5. DR. Edward L. Poelinggomang, M.A.	Konsultan I	
6. Drs. Anwar Thosibo, M.Hum.	Konsultan II	

ABSTRAK

Jurusan Sejarah dan Arkeologi
Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin
Skripsi, April 1994

Sarkawi
Gerakan Buruh di Makassar 1946-1955
xv + 90 halaman

Dalam berbagai literatur tentang sejarah Indonesia, kaum buruh nyaris tidak mendapat tempat. Kaum buruh hanya berfungsi sebagai "bahan bakar lokomotif ekonomi negara" dan secara politis menjadi massa pendukung elite yang berkuasa. Akan tetapi, jika dicermati secara lebih dalam dan lebih arif, akan ditemukan berbagai episode gerakan buruh yang tidak hanya menuntut perbaikan nasib atau kenaikan upah, tetapi juga ingin melihat negeri ini hidup dalam suasana kemerdekaan yang sejati.

Kota Makassar, sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Kawasan Timur Indonesia merupakan tempat berlangsungnya berbagai episode gerakan buruh. Oleh karena itu, kajian ini menjadikan Makassar sebagai pusat perhatian, dan terutama diarahkan untuk mengetahui signifikansinya terhadap perkembangan politik. Kajian ini sekaligus merupakan langkah awal untuk memperlebar horison dalam menekuni tema-tema sejarah non-konvensional, terutama sejarah dari mereka yang sering disebut-sebut sebagai "kaum pinggiran".

Dari hasil pelacakan terhadap berbagai sumber ditemukan bahwa, gerakan buruh di Makassar dilakukan melalui aksi mogok, anti over-werk, pemasangan pamflet, dan teror. Gerakan dimulai dari tahun 1949 dan memuncak pada tahun 1950. Setelah NIT bubar pada tahun 1950, gerakan buruh dalam skala yang besar tidak lagi seramai dibanding sebelum NIT bubar.

Kaum buruh yang diorganisir oleh berbagai serikat buruh (terutama oleh BPB) menjadikan gerakan sebagai bargaining weapon (senjata-tawar menawar) dalam memenuhi tuntutan mereka. Gerakan di samping bertujuan untuk perbaikan nasib atau kenaikan upah, juga memiliki tujuan politis. Tujuan politis tersebut adalah ingin membebaskan bangsa Indonesia, khususnya Makassar dari pengaruh dan tekanan Belanda.

Selain dilancarkan di pelabuhan, gerakan juga meluas ke tempat-tempat lain, seperti perusahaan minyak di Paotere, pelelangan ikan, dan percetakan. Akibatnya, hanya ada dua pilihan, memenuhi tuntutan buruh atau harus menerima kenyataan macetnya perusahaan mereka.

ABSTRACT

Department of History and Archeology
Letters Faculty of Hasanuddin University
Thesis, April 1994

Sarkawi
The Workers Movements In Macassar 1946-1955
xv + 90 pages

In various literatures on Indonesian history, the workers almost hadn't had the proper place. They were only functioned as "the locomotive's coal of the state economy" and politically becoming the mass who supported the elite rulers. Nevertheless, when it is observed deeply and wisely, we shall find several stages of workers movements that not only the improvements of life or increasing wages had they claimed, but also they wished to find the country lived in true freedom.

Macassar City, as the centre of Government and economics of the eastern of Indonesia was a place where the many workers movements took place. Therefore, this study is intended to promote Macassar as a centre of interest, and horizon in dealing with themes on non controversial history, especially the people who frequently were cited as "ignored people".

From the results of tracing several sources, it's found that the workers movements in Macassar were done with strike actions, anti overwork, installing the pamphlets, and terror. The movements were started in 1949 and reaching the peak in 1950. Sooner after Negara Indonesia Timur (NIT) was dispersed in 1950, the workers movements in large scale no longer exploded.

The workers who were organized by any workers union (especially by Badan Perjuangan Buruh) caused the movements as bargaining weapon in fulfilling their claims. Besides being aimed to improve their life or to increase the wages, the movements also had a political purpose. With this purpose, they wished to liberate Indonesians, particularly Macassarenes from the influence and intimidation of Netherland.

Besides being flared in the harbor, the movements also extended to the other places, such as Oil Company in Paotere, fish auction, and in printing house. As the result, there were only two choices to fulfil the claims or they were to find the fact of disturbance in the companies.

Other than flaring the movements, the workers who involved in various kinds of organizations, faced the competitions among the organizations in order to recruit members as many as possible. This condition was likely due to the many growing organizations, either in local or in branch of the organization contred in Jakarta.

From the many issues mentioned above, the writer tries to study it by using a set of common methods used in historical science. The study is done by using primary sources, especially from the Eastern of Indonesian Nasional Archives, Archives of

Province of Sulawesi Government, and personal files of H.A.R. Tamma. Besides that, the press media published at that time, either by workers union itself or by general publications extremely support this research. Those sources were completed with interviews and many kinds of books, journals, and papers that relevant to the topic of this study.

Reference: 65 (1946-1993)

KATA PENGANTAR

Sejarah selalu mengajarkan, keterkungkungan, kejenuhan yang mengental, ketidakpuasan yang terakumulasi, massa yang gerah, suatu saat akan meledak dan melahirkan tuntutan massal yang sulit terbendung.

(Sarkawi, *Identitas*, 12 Maret 1992: 2)

Petikan di atas adalah kesadaran yang menuntun penulis untuk melakukan kajian terhadap gerakan buruh di Makassar. Gerakan dari mereka yang nyaris terlupakan dalam pentas sejarah negeri ini. Ironis memang. Terlebih bagi mereka yang sedikit mengenal sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena kajian ini dapat selesai walaupun dalam bentuknya yang masih sederhana.

Dalam mengerjakan karya ini, penulis menggunakan beberapa sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer terutama diperoleh dari Arsip Nasional Perwakilan Sulsel dan sumber sekunder banyak diperoleh dari perpustakaan dan beberapa dari teman mahasiswa.

Dengan selesainya karya ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua, Bilaluddin Husain dan Sitti Hani'an. Keduanya adalah pribadi yang penulis sangat kagumi yang dengan "kesederhanaan", "keyakinan" dan doa'nya mengantarkan penulis untuk menyelesaikan studi.

Kakak penulis, Normadia bersama suaminya Mattoreang, Naskur bersama istrinya Hasmawaty, Mahdi dan adik Mustamin,

juga sangat banyak membantu penulis. Demikian pula, paman Buraerah dan tante Muliaty Syam, keduanya sangat berjasa dalam proses penyelesaian studi penulis. Semoga kebaikan hati mereka dicatat disisi Allah SWT. sebagai amal yang saleh.

Kelima adik sepupu penulis, Awalia, Sahruni, Muhaimin, Nur Ilma, dan Muhd. Fikruddin, amat besar andilnya selama studi penulis. Tingkah-polanya yang "lucu" membuat penulis selalu merasa segar. Semoga mereka dapat berbuat lebih baik, lebih berarti dari apa yang penulis lakukan.

Terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Edward L. Poelinggomang atas bimbingannya. Perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan, membuatnya selalu siap membimbing kapan dan di mana saja. Beliau tidak hanya mengoreksi, tetapi juga memberikan jalan keluar bagi penyelesaiannya. Demikian pula kepada Bapak Drs. Anwar Toshibo, M.Hum., penulis menyampaikan terima kasih atas kesediannya menjadi pembantu pembimbing. Saran dan pertimbangan akademiknya sangat bermanfaat dalam menyelesaikan karya ini, walaupun belum dapat dilaksanakan semuanya.

Terima kasih dan penghargaan yang sama, penulis ucapkan kepada Bapak Ketua Jurusan dan seluruh staf pengajar jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unhas. Semoga Allah SWT. selalu memberikan kesehatan agar mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sejarah menuju pencapaian kemanusiaan yang utuh.

Pernyataan terima kasih, penulis tujukan kepada Bapak H. Haneng, pimpinan dan staf Arsip Nasional Ujungpandang,

atas segala kebaikan dan kesediaannya melayani penulis selama mengumpulkan data. Tanpa bantuan dari mereka, penulis pasti tidak dapat meneruskan usaha pengkajian ini.

Dr. Suparlan Suhartono, M.Ed., juga adalah pribadi yang amat berjasa dalam studi penulis. Beliau adalah sosok ilmuan yang langka. Komitmennya yang tidak pernah berubah terhadap hidup dan pengembangan ilmu pengetahuan, membuatnya tidak pernah risih bergabung dalam "tradisi minum kopi" sambil berdiskusi bersama mahasiswa. Semoga Allah SWT. tetap memberikan kejernihan pikiran dan kesehatan, sehingga mampu untuk tetap mendampingi generasi yang haus akan ilmu pengetahuan.

Ucapan yang sama, penulis sampaikan kepada teman-teman yang selama ini bersama-sama dalam mengasah kepakaan intelektual, baik di Forum Kajian Filsafat dan Humaniora (FOKAFORA), Yayasan Ilmu Pengetahuan Indonesia (YIPTI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kelompok Studi Sejarah (KSS), Himpunan Mahasiswa Sejarah dan Arkeologi (HIMSA), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Senat Mahasiswa (SEMA), yang namanya penulis tidak dapat sebut satu persatu. Semoga tidak pernah jenuh dalam mengkaji persoalan-persoalan akademik dan persoalan-persoalan kemanusiaan yang terus bergulir.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis hadapkan karya ini ke hadapan dewan penguji yang terhormat. Dengan dada yang lapang, penulis selalu siap menerima masukan demi penyempurnaannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Memilih Judul	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan	10
C. Metode Penelitian	12
BAB II KEADAAN SOSIAL-EKONOMI DAN POLITIK MAKASSAR .	15
A. KEADAAN SOSIAL-EKONOMI	15
1. Keadaan Geografi dan Demografi	15
2. Keadaan Ekonomi	19
B. PERKEMBANGAN POLITIK	27
1. Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Kesatuan	27
2. Keadaan Politik Pasca Negara Indonesia Timur	40
BAB III ORGANISASI DAN GERAKAN BURUH: REALITAS DI MAKASSAR	53
A. Berdirinya Organisasi-Organisasi Buruh ..	53
B. Kaum Buruh: Antara Solidaritas dan Kepentingan Organisasi	62

C. Beberapa Aksi Gerakan Buruh	67
1. Gerakan Sebelum Negara Indonesia Timur Bubar	67
2. Gerakan Setelah Negara Indonesia Timur Bubar	78
BAB IV KESIMPULAN	83
DAFTAR BACAAN	

BAB I
PENDAHULUAN



A. Alasan Memilih Judul

Berbicara tentang buruh¹ dalam perspektif sejarah sungguh sangat menarik, walaupun persolan ini bukan hanya monopoli ilmu sejarah, tetapi juga menjadi kajian ilmu politik, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Dikatakan menarik, karena dalam sejarah Indonesia kaum buruh telah memainkan peranan penting, baik dalam bidang politik maupun

¹Istilah buruh dalam tulisan ini mengacu pada konsep yang terdapat dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, bahwa "Buruh adalah orang yang menjual tenaganya demi kelangsungan hidupnya. Ia tidak memiliki sarana atau faktor produksi selain tenaganya sendiri. Ia bekerja untuk menerima upah." Sedangkan untuk jenis-jenis buruh (status buruh dalam sebuah unit usaha) ada empat, yakni buruh borongan, buruh harian, buruh lepas, dan buruh tetap. Lihat: E. Nugroho, et.al., *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989), hal. 568. Konsep lain yang tidak jauh berbeda dapat dibaca dalam: Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Jembatan, 1987) dan Sofyan Effendi, *Hukum Perburuhan di Indonesia, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan* (jilid 3), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 1198.

Sebenarnya, istilah buruh dalam konsep tradisional sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yakni Sawi. Sawi adalah anak buah atau pengikut seseorang *punggawa* dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan dalam suatu kesatuan usaha, baik dalam waktu yang lama, maupun dalam waktu yang singkat yang diperlukan oleh usaha itu. Lihat: Mattulada, "Manajemen Tradisional Dalam Kalangan Usahawan Orang Bugis Makassar" dalam: Mukhlis, *Dinamika Bugis-Makassar* (Ujungpandang: PLPIIS-YIIS, 1986), hal. 114-115. Baca juga: Abu Hamid, "Melestarikan Kebahariawan Masyarakat Sulawesi Selatan (Suatu Tinjauan Antropologi Sosial)" dalam: *LONTARA XXVIII* (1990, No. 37), hal. 40 dan Ph.D.L. Tobing, *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa* (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1961), hal. 49.

dalam bidang ekonomi.²

Dalam perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan, episode pergerakan buruh untuk mengusir penjajah tidak dapat diabaikan.³ Selain itu, dalam bidang politik, buruh menjadi salah satu basis kekuatan bagi pengembangan partai-partai politik. Hal ini tampak dengan menjamurnya organisasi-organisasi buruh yang berafiliasi dengan partai-partai politik yang ada, seperti Gerakan Organisasi Buruh Syarikat Islam Indonesia (GOBSI) yang bernaung di bawah Partai Syarikat Islam Indonesia⁴, Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) yang berada di bawah Partai Nahdatul

²Lihat misalnya: Joko Utomo, "Pemogokan Buruh Tani di Abad ke-19: Kasus Yogyakarta" dalam: *PRISMA* (1993, No. 8), hal. 68-78. Lihat juga: Bambang Sulistyono, "Pemogokan Buruh Pabrik Gula di Jawa pada Masa Kolonial 1918-1920" (Yogyakarta: Teisi pada Universitas Gadjah Mada, 1991).

³Seperti yang dilakukan oleh Angkatan Muda Indonesia Kereta Api dan Buruh pada tanggal 3 September 1945 yang mengambil alih stasiun Manggarai dan stasiun Jatinegara serta menyatakan Kereta Api adalah milik negara Republik Indonesia. Selanjutnya seluruh Kereta Api di Jakarta dibebaskan dari kekuasaan Jepang. Kemudian buruh trem juga melakukan hal yang sama pada tanggal 4 September 1945, dan pada tanggal 5 September 1945 Stasiun Radio Jakarta direbut dari tangan Jepang sekaligus berusaha mengusir orang-orang Jepang. Pada tanggal 11 September 1945 seluruh radio di Jakarta sudah dikuasai oleh bangsa Indonesia. Lihat: Soebadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 77-78.

⁴Sandra, *Menjungkap Dunia Modern. Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia* (Jakarta: Pustaka Rakjat, 1960), hal. 130. Keputusan untuk mendirikan GOBSI diambil ketika sidang majelis PSII yang ke-29 pada tanggal 22-27 Maret 1953. Kemudian direalisasikan pada permulaan tahun 1955. Anggota dari organisasi buruh ini umumnya bekerja dalam bidang perkebunan.

Ulama (NU)⁵, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang bernaung di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI)⁶.

Sementara itu, peranan buruh dalam bidang ekonomi tidak dapat disangsikan lagi. Mereka (baca: buruh) sudah menjadi bagian mutlak dari aktivitas perekonomian. Apa yang dikemukakan oleh seorang filsuf terkenal, Bertrand Russel, bahwa pemilikan tanah dan modal tidak berdaya tanpa buruh atau tenaga kerja...⁷ adalah sangat tepat. Bahkan untuk menarik investor menanamkan modalnya, buruh Indonesia termasuk yang "dijual" dengan promosi "keuntungan komparatif" (*Comparative Advantage*), yaitu tersedianya tenaga buruh yang lebih murah.⁸

Selanjutnya dalam penataan struktur politik menurut pembagian masyarakat secara fungsional, buruh diposisikan

⁵*Ibid.*, hal. 127. Pendirian SARBUMUSI diputuskan dalam kongres NU yang ke-20 di Surabaya. Hal itu sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga NU Pasal 13 ayat 3, tentang kewajiban pengurus besar NU untuk mengadakan badan-badan otonomi dalam lingkungan pimpinan pusat partai.

⁶*Ibid.*, hal. 69. Lahirnya SOBSI adalah berkat usaha Alimin dan Harjono yang pada tanggal 29 Nopember 1946 yang menyatukan antara organisasi-organisasi yang keluar dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GABSI) menjadi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).

⁷Bertrand Russel, *Kekuasaan: Sebuah Analisis Sosial Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hal. 98.

⁸Eddy Rifai, "Eksplotasi Buruh Sebagai Kejahatan Wihte-Collar". *KOMPAS* (Senin, 21 Oktober 1991), hal. 4.

sebagai "bahan bakar lokomotif" ekonomi negara dalam proses produksi, dan secara politis disiapkan menjadi massa pendukung elite yang berkuasa.⁹

Namun sangat disayangkan, keterlibatan atau sumbangsih kaum buruh tidaklah sepadan dengan apa yang mereka terima. Upah yang rendah, keselamatan kerja yang tidak terjamin, jam kerja yang terlalu padat, dan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selalu menghantui dan mengiringi langkah mereka. Dengan demikian tidaklah mengherankan kalau sepanjang sejarah Indonesia tidak pernah sepi dari gerakan buruh, seperti pemogokan¹⁰, khususnya yang tergabung dalam berbagai organisasi-organisasi buruh.

Berbagai penyebab aksi gerakan buruh tersebut juga diakui oleh Marx. Menurutnya, daya dorong awal untuk para pekerja mengorganisasikan diri melawan pemilik modal berasal dari sumber-sumber ketidakpuasan yang sangat duniawi:

⁹Teten Masduki, Arah Menuju Reformasi Politik Perburuhan. *KOMPAS* (Senin, 21 Oktober 1991), hal. 4.

¹⁰Istilah pemogokan dalam tulisan ini mengacu pada konsep yang diajukan oleh W. Herschel dari Jerman, "Pemogokan ialah penghentian pekerjaan bersama-sama oleh beberapa buruh yang dilakukan sebagai alat perjuangan dan dengan maksud setelah berhasilnya perjuangan akan kembali bekerja. Juga penolakan bersama terhadap pelaksanaan sebagian pekerjaan adalah pemogokan". J. Pareira Mandalangi, "Aspek-aspek Internasional dan Nasional Dari Hak Mogok", *PRO JUSTITIA IX* (Oktober 1991, No, 4), hal. 5. Baca juga: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 pasal 1 d, sub 2 dan Undang-Undang Nomor 7 PRPS 1963 pasal 1 b dalam: Sofyan Effendi, *op. cit.*, hal. 1198, 1179-1180.

kondisi kerja yang mengesankan, upah yang rendah, ketidakamanan kerja, dan semacamnya¹¹, semua ini mendorong para buruh untuk melakukan gerakan seperti pemogokan.¹²

Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, dalam kurun waktu 1946-1955 di Makassar juga terjadi serangkaian gerakan buruh. Dalam tahun 1952 saja, jumlah perselisihan perburuhan sebanyak 206 dan jumlah buruh yang mogok tidak kurang dari 4172.¹³ Tentunya, gerakan ini tidak timbul dengan sendirinya, tetapi didahului oleh situasi yang sangat kompleks. Pemogokan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh berbagai tuntutan seperti kenaikan

¹¹Ross Poole, *Moralitas dan Modernitas Di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 205.

¹²Sampai tulisan ini dikerjakan "atmosfir" Indonesia masih terus diwarnai oleh aksi pemogokan. Menurut data yang dihimpun oleh majalah *EDITOR* dan *PRISMA*, pada tahun 1988 terjadi 39 kasus pemogokan, tahun 1989 dan tahun 1990 masing-masing 19 dan 61 kasus, tahun 1991 sampai bulan Juli tercatat 73 kasus pemogokan dan pada tahun 1992, khusus di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta, sampai bulan Nopember tercatat 190 kasus pemogokan. Lihat: *EDITOR* VI (3 Juli 1993, No. 40), hal. 64. dan *PRISMA* XXI (1992, No. 3), hal.2. Baca juga *PRISMA* XXI (Januari 1992, No. 1), hal.77. Bahkan pihak majikan (pimpinan perusahaan) tega menghabisi nyawa buruh yang dianggap vokal dalam pemogokan. Hal itu terjadi pada diri Marsinah yang bekerja pada PT. CPS. Untuk kasus ini, baca: *t.p./*, *Marsinah: Buruh Kecil Korban Pembunuhan Karena Menuntut Perbaikan Nasib* (Surabaya: Surabaya Metropolis Pers, 1993). Lihat juga: Guntingan Koran dan Majalah tentang Perburuhan *PROBLEMA* (1993, No. 4) yang disusun oleh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).

¹³Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi* (Jakarta: Departemen Penerangan, 1953), hal. 519.

upah, keselamatan kerja, dan lain-lain. Namun juga dimotivasi oleh suatu keinginan untuk melihat Indonesia, khususnya Makassar bebas dari pengaruh dan tekanan pihak penjajah.

Keinginan tersebut sangat jelas terlihat, seperti yang terlihat dalam selebar pamflet yang ditemukan oleh Agen Polisi Langkoke pada tanggal 25 Januari 1950 yang menyerukan pemogokan dan persatuan kaum buruh agar penjajahan runtuh.¹⁴

Selain plakat seperti tersebut di atas, masih banyak terjadi serangkaian episode pergerakan buruh yang lebih besar. Hanya saja kajian-kajian tentang buruh yang bersifat ilmiah dengan segala dimensinya masih sepi, khususnya dalam perspektif sejarah. Yang banyak adalah berita tentang aksi pemogokan di berbagai daerah di Indonesia dan negara lainnya. Sepanjang pengetahuan penulis, minat mahasiswa sejarah untuk menjadikan buruh sebagai sasaran studi masih kurang. Bahkan di toko-toko bukupun nyaris tidak ditemukan karya-karya sejarah tentang perburuhan, yang banyak adalah kajian dalam perspektif hukum dan beberapa karya ilmiah populer, baik di majalah, jurnal, maupun surat kabar.

Sampai saat ini, khususnya di Universitas Hasanuddin

¹⁴Arsip: Arnas Perw. Sul-Sel. Arsip Pemerintahan Indonesia Timur 1946-1950. No. Reg. 153.

yang mengangkat persoalan buruh dalam sebuah karya akademis (skripsi) di bidang sejarah baru satu orang ditambah satu tesis dari salah seorang staf dosen yang menyelesaikan studi pasca sarjana (S2) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Pada tahun 1990, Man Arfa mengajukan skripsi yang berjudul "Partisipasi Buruh Pelabuhan Makassar Dalam Perjalanan Sejarah Sulawesi Selatan 1945-1973". Uraian dari skripsi ini terkesan sangat umum dan tidak mengkaji aspek tertentu dari buruh. Namun demikian, karya ini dapat memberikan informasi awal tentang buruh pelabuhan Makassar.¹⁵

Untuk menghindari adanya kesan, kajian yang penulis lakukan sama dengan skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan beberapa hal, khususnya menyangkut perbedaan sudut pandang atau sasaran kajian.

Skripsi yang disusun oleh Man Arfa mengkhususkan kajiannya pada buruh pelabuhan dengan kurun waktu 1945-1973. Perhatian utamanya diarahkan antara lain pada: bagaimana sistem perburuhan yang berlaku pada tahun 1945-1973; apakah sistem perburuhan yang berlaku pada masa revolusi fisik dapat memberikan kesejahteraan bagi buruh; bagaimana

¹⁵Untuk mengetahui isi lengkap dari karya ini, baca: Man Arfa, "Partisipasi Buruh Pelabuhan Makassar Dalam Perjalanan Sejarah Sulawesi Selatan 1945-1973" (Ujung-pandang: Skripsi pada Fakultas Sastra Unhas, 1990).

pengaruh modernisasi (penggunaan derek, mobil, dan lain-lain) terhadap buruh pelabuhan; dan bagaimana dampak perburuhan terhadap masyarakat. Skripsi ini juga ingin mengambil suatu perbandingan antara situasi perburuhan sebelum dan sesudah berdirinya Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Sementara itu, kajian yang penulis kerjakan tidak hanya terbatas pada buruh pelabuhan, tetapi juga menyangkut buruh yang bekerja di tempat lain, seperti buruh percetakan, pelelangan ikan dan buruh pelayan. Rentang waktu pengkajian adalah tahun 1946-1955 dengan perhatian utama pada gerakan yang dilakukan oleh buruh. Variabel terpenting yang ingin dilihat adalah signifikansi perkembangan politik dan ekonomi terhadap gerakan buruh; organisasi buruh apa saja yang melakukan gerakan; bagaimana dan mengapa terjadi gerakan; serta bagaimana perkembangan organisasi buruh di Makassar, baik yang lokal maupun cabang dari pusat Jakarta. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, kajian ini memiliki kesamaan, khususnya menyangkut sumber yang digunakan. Sumber yang dimaksud adalah Arsip Pemerintahan Indonesia Timur, reg. 152 dan buku Propinsi Sulawesi.

Karya kedua yang membahas masalah buruh dilakukan oleh Bapak Drs. Bambang Sulistyono, MS. Tesis beliau yang berjudul "Pemogokan Buruh Pabrik Gula di Jawa Pada Masa Kolonial

(1918-1920)" digarap secara profesional dengan menggunakan beberapa teori. Karya ini memberikan kejelasan dan menguraikan dengan detail tentang hal-hal yang menyebabkan terjadinya pemogokan buruh pabrik gula di Jawa pada masa kolonial.¹⁶

Selain dua karya tersebut, terdapat sejumlah tulisan ilmiah populer, baik dalam jurnal, majalah maupun surat kabar. PRISMA, TEMPO, EDITOR, PRO JUSTITIA, KOMPAS, dan SUARA PEMBARUAN antara lain banyak menyajikan persoalan perburuhan.

Tambahan pula, karya-karya yang ada (baca: skripsi mahasiswa) selama ini masih banyak yang terkonsentrasi pada sejarah - meminjam istilah Sartono Kartodirdjo - konvensional,¹⁷ seperti biografi pahlawan/tokoh, perang, dan perjanjian-perjanjian dan penulisannya bersifat deskriptif-naratif. Sedangkan kajian-kajian dalam bidang lain seperti sejarah sosial, sejarah petani, perburuhan, dan lain-lain masih kurang disentuh. Dengan demikian, penulis berusaha memasuki wilayah kedua dan sedapat mungkin menyajikan dalam bentuk deskriptif-analitis.

¹⁶Lebih jauh tentang karya ini, baca: Bambang Sulistyono, *loc. cit.*

¹⁷Tentang sejarah konvensional, lihat: Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal.44-46; 225-228.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan

Pergolakan sosial termasuk gerakan buruh memiliki dimensi yang kompleks. Ia merupakan akumulasi faktor politik, ekonomi, sosial, dan kultural, bahkan keagamaan. Demikian pula dengan gerakan buruh di Makassar tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas tersebut. Oleh karena itu mustahil untuk mengkaji secara detail kompleksitas itu hanya dalam satu atau beberapa kajian saja. Sehubungan dengan itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail, penulis menyiasatinya dengan hanya menyoroti aspek politik dan ekonominya saja.

Untuk itu, kajian dalam studi ini dibatasi khusus pada daerah Makassar yang berlangsung selama sembilan tahun, yakni dari 1946 sampai 1955. Dipilihnya Makassar sebagai pusat perhatian dalam kajian ini, karena selain sebagai pusat pemerintahan (NIT) pada waktu itu, juga karena memiliki pelabuhan besar sebagai salah satu tempat berlangsungnya aktivitas perekonomian yang padat. Konsekuensi logis dari sebuah daerah yang memiliki aktivitas perekonomian yang padat adalah tumbuhnya sentra-sentra industri seperti pabrik, perusahaan yang nota bene memiliki banyak buruh. Sebagai gambaran, buruh di Makassar yang terdaftar pada tanggal 1 Januari 1953 sebanyak 40163 orang dengan 144 serikat buruh.¹⁸ Sedangkan pengambilan

¹⁸Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 517.



waktu dari tahun 1946-1955 adalah didasarkan pada terbentuknya negara Indonesia Timur (NIT) sampai pemilihan umum I 1955.

Tujuan kajian ini ialah untuk merekonstruksi kembali beberapa gerakan buruh yang terjadi di Makassar. Gerakan yang dilakukan oleh buruh dalam kajian ini berbeda dengan gerakan yang biasanya terjadi. Tujuan gerakan tidak hanya bertumpu pada peningkatan kesejahteraan buruh, tetapi juga berdimensi politis, yakni bertujuan membebaskan bangsa Indkhususnya Makassar dari pengaruh dan tekanan pihak penjajah.

Dengan demikian, kajian ini ingin menyoroti signifikansi dari perubahan dan perkembangan politik dan ekonomi yang terjadi di Makassar terhadap gerakan buruh. Penjelasan dalam perspektif ini sangat penting mengingat berbagai persoalan yang timbul banyak dipengaruhi oleh situasi sosial politik dan ekonomi yang sedang berlangsung.

Kajian ini juga berusaha mengungkapkan berbagai hal menyangkut bagaimana dan mengapa terjadi gerakan. Di samping itu, akan diuraikan beberapa hal menyangkut organisasi-organisasi buruh yang ada dalam kurun waktu tersebut. Dengan demikian diharapkan karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu sejarah dan menambah semaraknya kajian-kajian dalam bidang sejarah non konvensional di kalangan mahasiswa Sejarah Unhas.

C. Metode Penelitian

Sebagaimana lazimnya penelitian sejarah, dalam karya ini juga menggunakan metode sejarah. Kegiatan penelitian dimulai dengan pengumpulan sumber¹⁹ yang berhubungan dengan sasaran kajian, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer berupa dokumen tentang gerakan buruh di Makassar diperoleh dari Arsip Nasional Perwakilan Sulawesi Selatan, masing-masing arsip tentang Pemerintahan Indonesia Timur 1946-1950, Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi 1950-1960, dan Arsip Pribadi H.A.R. Tamma.

Dalam Arsip Pemerintahan Indonesia Timur, ditemukan antara lain laporan tentang pemogokan buruh di pelabuhan,

¹⁹Penjelasan tentang sumber dalam penelitian dan penulisan sejarah banyak terdapat dalam literatur-literatur yang ditulis oleh para ahli sejarah. Lihat misalnya, Muhd. Yusof Ibrahim, *Pengertian Sejarah: Beberapa Pembahasan Mengenai Teori dan Kaedah* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1986), hal. 64-90. Baca juga: Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu* (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1981), hal. 105-132. Lihat juga: Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (terjemahan Nugroho Notosusanto), (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 35-40. Selanjutnya: Edward L. Poelinggomang, "Sumber dan Kritik Sejarah" (Ujungpandang: Makalah yang disampaikan pada Pelatihan Metodologi Sejarah se-Kota Madya Ujungpandang yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Sejarah (KSS) Fakultas Sastra Unhas, tanggal 20 Juni 1992). Sedangkan cara-cara dan teknik pengambilan catatan, Kuesioner dan Wawancara, Perpustakaan, Arsip dan Museum serta petunjuk penelitian, lihat: "Mechanical Aids to Research" dalam: Gilbert J. Garraghan, *A Guide to Historical Method*, (New York: Forhan University Press, 1957). Tugas mata kuliah Metodologi Sejarah oleh Ni Nyoman Sudewi, Program Studi Sejarah Fakultas Pasca Sarjana UGM, Oktober 1989.

laporan politik daerah selebes selatan yang disampaikan oleh Hadat Tinggi, notulen rapat organisasi-organisasi sosial dan politik, laporan politik afdeling Makassar, serta laporan mengenai penyebaran plakat-plakat anti Negara Indonesia Timur. Sementara itu. dalam Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi terdapat berita politik dari kepolisian daerah Sulawesi Selatan, laporan-laporan rapat organisasi/partai politik, dan lain-lain. Sedangkan dalam koleksi Arsip Pribadi H.A.R. Tamma terdapat berbagai jenis surat kabar, bulettin dan majalah yang terbit pada waktu itu, seperti Harian DINIHARI, MARHAEN, PEDOMAN, dan sebagainya.

Salah satu buku yang juga banyak menjadi sumber dalam tulisan ini berjudul Republik Indonesia: Propinsi Sulawesi yang diterbitkan oleh kementerian penerangan. Buku ini membahas secara singkat berbagai hal menyangkut Sulawesi, termasuk persoalan buruh di Makassar.

Sumber lain berupa buku-buku yang relevan, majalah, jurnal dan berbagai macam surat kabar sangat membantu dalam menyelesaikan karya ini. Sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan Universitas Hasanuddin, perpustakaan P3MP, perpustakaan wilayah dan beberapa dari dosen dan teman mahasiswa. Untuk gambaran yang jelas dan lengkap tentang berbagai sumber tersebut, penulis akan mencantumkannya pada bagian akhir karya ini.

Tahap kedua setelah terkumpulnya sumber adalah kritik sumber.²⁰ Kalau lazimnya dikenal ada dua macam kritik sumber, yakni kritik eksteren dan interen, maka dalam pengerjaan karya ini penulis lebih menekankan pada kritik intern yang bertujuan untuk menilai validitas keterangan sehingga tingkat kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pada tahap ketiga dilakukan sintesa dari berbagai fakta yang mempunyai hubungan dengan sasaran kajian dan tahap terakhir adalah penyusunan kisah yang menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lainnya.

²⁰Tentang kritik sumber, lihat: Ibrahim, *op. cit.*, hal. 91-119. Baca juga: Gottschalk, *op. cit.*, hal. 80-117. Terdapat juga dalam Poelinggomang, *op. cit.*, hal. 4-6. Lihat pula: Garraghan, *op. cit.* Tugas mata kuliah Metodologi Sejarah oleh M. Nur, Program Studi Sejarah Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1989. Juga disinggung oleh Sartono Kartodirdjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen" dalam: Koentjaraningrat (ed.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985), hal. 44-69.

B A B II

KEADAAN SOSIAL-EKONOMI DAN POLITIK MAKASSAR

A. Keadaan Sosial-Ekonomi

1. Keadaan Geografi dan Demografi

Makassar adalah sebuah kota yang terbesar di Sulawesi. Kota ini terletak di tepi selat Makassar, di pesisir barat semenanjung Sulawesi sebelah barat-daya¹ dengan sederetan pulau-pulau kecil, tak ubahnya sebagai pengawal Kota Makassar terhadap ancaman musuh dari seberang. Pulau-pulau kecil yang terdiri atas puluhan pulau itu dihuni oleh orang-orang Makassar yang sumber penghidupannya sebagian besar di laut.²

Selain itu, Makassar merupakan dataran rendah yang landai dan terkenal dengan sebutan Daratan Sawitto, dengan ketinggian rata-rata 0-10 meter dari permukaan air laut. Kota ini diapit oleh dua sungai, yakni sungai Jeneberang (di bagian selatan) dan sungai Tallo (di bagian utara) yang berfungsi sebagai lalu lintas penduduk dari pedalaman, khususnya jika ingin memasarkan hasil buminya ke Kota Makassar. Kota ini terletak pada koordinat 119 24-120 38

¹T.S.G. Mulia dan K.A.H. Hidding, *Ensiklopedi Indonesia* (Bandung: w.van Hoeve Bandung. 's-Gravenhage, /t.th./), hal. 884.

²Daud Limbugau, "Perjalanan Sejarah Kota Makassar Abad 19 - 20" dalam: Mukhlis (ed.), *Persepsi Sejarah Kawasan Pantai* (Ujungpandang: P3MP, UNHAS - YIIS, 1989), hal. 5.

bujur timur dan 5 8 -6 19 lintang selatan serta beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim peralihan antara rezim hujan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Sedangkan curah hujan di daerah ini terbanyak jatuh pada bulan Januari, dengan curah hujan rata-rata 3.000 milimeter pertahun. Jumlah hari hujan lebih kurang 158 hari dengan suhu udara rata-rata 26,5 C.³

Dengan letaknya yang strategis itu menjadikan Makassar sebagai bandar niaga sejak tahun 1511⁴ dan sebagai pusat pemerintahan. Keadaan ini pulalah yang menjadikan Makassar dihuni oleh berbagai suku bangsa.

Pada tahun 1856, penduduk Makassar berjumlah 34.940 jiwa yang terdiri atas 665 jiwa bangsa Eropa, 1805 orang Cina, 39 orang Arab dan 32.424 orang penduduk pribumi.⁵ Sementara itu, pada tahun 1860 penduduk Makassar berjumlah 42.098 orang dengan komposisi, bangsa Eropa 714 orang, Cina

³E. Nugroho, et.al., (red.), *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 199), hal. 21.

⁴Lebih jauh tentang Makassar sebagai bandar niaga dapat dibaca dalam: Mattulada, *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah* (Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1990), hal. 147-149. Sedangkan kajian tentang Perdagangan Makassar Pada Abad Ke-19, khususnya tentang Proteksi dan Perdagangan Bebas, dapat dibaca dalam Edward L. Poelinggomang, "Proteksi dan Perdagangan Bebas: Kajian Tentang Perdagangan Makassar Pada Abad Ke-19", (Amsterdam: disertasi pada Vrije Universiteit, 1991).

⁵Daud Limbugau, *op. cit.*, hal. 41. Dikutip oleh Daud Limbugau dari Arnas RI., *Algemene Verslag van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigeden het jaar 1865.*

3002 orang, Arab 10 orang dan penduduk pribumi berjumlah 38.372 orang⁶. Empat tahun kemudian (1864) jumlah penduduk Makassar adalah 41.341 orang dengan 712 orang Eropa, Cina 3780, Arab 12 orang dan penduduk pribumi 37.827 orang.⁷ Sedangkan pada akhir tahun 1869 penduduk Makassar mencapai 41.870 orang yang terdiri atas 747 orang bangsa Eropa, 3944 orang Arab dan 37.165 penduduk pribumi.⁸

Dari data di atas tampak bahwa dari tahun 1856 sampai tahun 1860 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 7158 orang, sedangkan dari tahun 1860 sampai tahun 1864 terjadi penurunan sebesar 1758 dan dari 1864-1869 terjadi kenaikan sedikit, yakni sebesar 529 jiwa.

Selanjutnya, pada tahun 1916, penduduk Makassar berjumlah 39.000 orang yang terdiri atas 6000 orang Cina, Eropa 1500 orang, Timur Jauh 300 orang dan 30.300 jiwa adalah pribumi.⁹ Rupanya selama 47 tahun berikutnya (1869-1916) di Makassar terjadi penurunan penduduk yang sangat drastis, yakni sebesar 2870 jiwa.

⁶Ibid.

⁷Ibid. Dikutip oleh Daud Limbugau dari Arsip Nasional RI., *Bijlang voor het Algemeen Verslag van het Gouv. Celebes en Onerhoorigeden voor het jaar 1864.*

⁸Ibid.

⁹Mukhlis Paeni, et.al., *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan: Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900-1950* (Jakarta: Depdikbud, 1984/1985), hal. 63.

Dalam masa empat belas tahun berikutnya, yakni pada tahun 1930, penduduk Makassar telah berjumlah 84.885 jiwa yang terdiri atas berbagai etnik dan bangsa. Etnik Makassar berjumlah 37.389 jiwa, Bugis 15.799 jiwa, Mandar 412 jiwa, Selayar 1,808 jiwa, Toraja 377 jiwa, Ambon 1,460 jiwa, Jawa dan Madura 4,595 jiwa dan Sunda 217 jiwa. Sedangkan bangsa lain yang juga mendiami Makassar terdiri atas Eropa 3,447 jiwa, Cina 15,363, dan bangsa Asing lainnya 600 jiwa jiwa.¹⁰

Komposisi penduduk tersebut di atas menunjukkan suasana kosmopolitan Kota Makassar yang sejak pembentukan Pemerintahan Timur Besar pada tahun 1938 sampai dibubarkannya NIT pada tahun 1950 menjadi ibu kota administratif bagi seluruh kepulauan sebelah timur. Besar kota Makassar tidak tertandingi oleh kota lain manapun di Sulawesi Selatan, sekaligus juga mempunyai penduduk yang paling "gado-gado" dari sudut ras.¹¹

Pada tahun 1952 penduduk Makassar telah berjumlah lebih kurang 285.000 jiwa.¹² Jumlah itu terdiri dari berbagai suku bangsa, baik pribumi maupun bangsa asing.

¹⁰Barbara Sillars Harvey, *Pembrontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hal. 82.

¹¹*Ibid.*, hal. 90.

¹²Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia: Propinsi Sulawesi* (Jakarta?: Departemen Penerangan, 1953), hal. 25. Lihat juga, Anhar Gonggong, *Abdul Gahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pembrontak* (Jakarta: Grasindo, 1992), hal. 26.

2. Keadaan Ekonomi

Makassar, selain dikenal sebagai pusat pemerintahan juga dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi. Hal itu disebabkan oleh keadaan geografisnya dan potensi alam yang cukup besar. Di samping itu, Makassar memiliki sebuah pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya bongkar muat barang, baik ekspor maupun impor.

Menurut laporan Sarwo (direksi pelabuhan Makassar)¹³, dalam tahun 1951-1955 kapal yang keluar masuk pelabuhan rata-rata di atas 1000 buah pertahun dengan tonage rata-rata 10.000.000 m³. Demikian pula perahu yang keluar masuk selama masa itu rata-rata di atas 3000 buah dengan tonage rata-rata 1.500.000 m³.

Melalui pelabuhan inilah, hasil bumi dan hasil laut dari berbagai daerah di wilayah timur diekspor ke luar negeri. Hasil bumi dan laut itu antara lain damar, kopra, rotan, kulit kayu, pala, kayu, mutiara, agar-agar, dan lain-lain. Begitu pula sebaliknya, di pelabuhan ini dibongkar barang-barang industri dari luar negeri, seperti tekstil, barang pecah belah dan kebutuhan rumah tangga. Pengangkutan barang ini umumnya dilakukan oleh Koninklijke

¹³Sarwo, "Pelabuhan Makassar Sebagai Pintu Gerbang Kota" dalam: Sikado Dg. Nai, et.al., *Kenangan 50 Tahun Berotonomi Kota Makassar* (Makassar?: /t.p./, 1957?), hal. 166.

Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)¹⁴, kemudian oleh Palayaran Nasional Indonesia (PELNI), Perusahaan Pelayaran Sulawesi Selatan (PPSS) dan lain-lain.¹⁵

Pelabuhan yang merupakan pintu depan dari sebelah timur Indonesia ini tidak hanya diramaikan oleh kapal-kapal KPM, tetapi juga oleh kapal-kapal dari luar negeri, baik dari Jepang, Filipina, Australia, dan sebagainya.¹⁶

Sejak tahun 1930-an hingga pecah Perang Dunia II, orang-orang Bugis-Makassar telah ikut dalam kegiatan ekspor dan impor sebagaimana dilakukan oleh orang-orang asing seperti Cina. Selain itu, mereka juga telah memiliki organisasi atau perkumpulan dagang, seperti Firma, Perseroan Terbatas (PT), dan Naamlooze Venootschap (NV). Vereeniging van Indonesische Importeur yang dipimpin oleh Moh. Arsyad adalah salah satu usaha dagang yang terkenal pada waktu itu. Selain itu, terdapat sejumlah organisasi dagang di kalangan Indonesia (PPI) yang dipimpin oleh Andi Mattonrokang, 2)

¹⁴KPM adalah perusahaan pelayaran milik Belanda. KPM merupakan perusahaan pertama yang disita oleh serikat-serikat buruh PKI dan PNI pada tanggal 3 Desember 1957. Pada saat penyitaan, sebagian besar perairan Indonesia. Hal ini memperbesar ketidakpuasan daerah atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jakarta. Hatta dan para pemimpin Masyumi mengecam buruknya perencanaan atas tindakan-tindakan pengambilalihan itu. Uraian lebih lanjut mengenai pengambilalihan ini dapat dibaca dalam : M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hal. 394.

¹⁵Sarwo, *op. cit.*, hal. 115.

¹⁶Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 379.

Gabungan Pedagang-Pedagang Indonesia (GAPPI) dipimpin oleh H. Mansyur Dg. Tompo, 3) Persatuan Nelayan Indonesia (PERNI) dipimpin oleh A. Mattonrokang, dan 5) Maskapai Kapal Selebes Selatan (MKSS) dengan direksi Moh. Arsyad.¹⁷

Mata dagangan yang sangat penting di Makassar pada waktu itu adalah beras dan kopra. Beras, selain dikonsumsi dan diperdagangkan di dalam Kota Makassar, juga diantarpulaukan. Sedangkan kopra sangat penting bagi kebutuhan bahan baku pabrik minyak goreng di samping untuk diekspor.

Beras dan kopra tersebut juga dipasarkan pada pasaran bebas di Makassar dalam bentuk eceran. Pada bulan Desember tahun 1953, 1954, 1955 harga minyak kelapa tiap 10 liter adalah masing-masing secara berurutan Rp 14,40, Rp 16,80, dan Rp 27,60. Sedangkan harga eceran kopra pada bulan Desember tahun 1954, 1955 masing-masing Rp 140,00 dan Rp 127,00 tiap 100 kg.¹⁸

Jumlah ekspor pada tahun 1939 adalah kopra; diperkirakan 57% dari seluruh jumlah ekspor Makassar¹⁹ sedang pada

¹⁷Mukhlis Paeni, *op. cit.*, hal. 96-98. N.V. Maskapai Kapal Selebes Selatan (MKSS) didirikan pada bulan Juli 1947 di Makassar. Maskapai ini telah mengoperasikan 6 buah kapal untuk trayek-trayek Makassar-Raha, Makassar-Selayar, Teluk Bone dan Makassar-Pantai Barat Sulawesi sampai di ToliToli (sebelah utara). Lihat: Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 378.

¹⁸Anhar Gonggong, *op. cit.*, hal. 28-30.

¹⁹Barbara Sillars Harvey, *Permesta: Pembontakan Setengah Hati* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hal.37.

tahun 1950, 1951, 1952 jumlah ekspor masing-masing 129.814 ton, 179.053 ton, dan 141.469 ton. Ekspor ini sebagian besar dilakukan ke Eropa-Barat, antara lain Nederland, Jerman Barat, Skandinavia, Inggris, dan Perancis.²⁰

Untuk menjaga agar mutu atau kualitas kopra tetap terjamin, di samping untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopra maka, didirikanlah yayasan kopra pada September 1940 dengan nama "Stichting van het Coprafonds" dan pada Nopember 1950 berubah menjadi yayasan kopra pada September 1940 dengan nama "Stichting van het Coprafonds" dan pada Nopember 1950 berubah menjadi "Yayasan Kopra" yang pusatnya berkedudukan di Jakarta.²¹

Dalam bidang impor, atas anjuran Nadjamuddin Dg. Malewa, Perdana Menteri sekaligus Menteri Perekonomian NIT pada waktu itu, didirikanlah maskapai dagang, seperti N.V. Indonesia Trading Co., N.V. Handel Mij. Indonesia Timur, N.V. Handel Mij. Madjoe.²²

²⁰Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 445.

²¹Keterangan lebih jauh tentang Yayasan Kopra, berikut aktivitasnya dalam bidang ekspor, perbaikan mutu maupun usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan petani kopra dapat dibaca dalam Kementerian Penerangan. *Ibid.*, hal.455-457.

²²*Ibid.*, hal. 400. Rencana perekonomian yang diajukan oleh Nadjamuddin Dg. Malewa dalam kedudukannya sebagai Menteri Perekonomian NIT dititik beratkan pada: 1) menjalankan segala daya upaya untuk memperbesar produksi pangan dan sandang, 2) memperbesar ekspor, dan 3)

Setelah penyerahan kedaulatan dan kembalinya Indonesia dalam negara kesatuan, maka menteri perekonomian memberi perlindungan kepada para importir dengan menerapkan "system benteng"²³ yakni pembatasan impor terhadap barang tertentu dan pemberian lisensi impor hanya bagi importir Indonesia. Dengan demikian, jumlah "importir-ipmortir benteng: yang telah diakui pemerintah di Makassar sebanyak 30 yang bernaung di bawah Persatuan Importir Nasional Indonesia yang menjadi salah satu bagian dari Gabungan Pengusaha Nasional Indonesia yang telah pula didirikan di Makassar.²⁴

Walaupun importir Indonesia telah dilindungi, mereka juga tetap mendapat kesulitan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya modal, kurang atau tidak adanya pengalaman dalam hal perdagangan, dan tempat-tempat strategis untuk menjalankan perdagangan telah ditempati oleh pedagang-pedagang asing terutama Tionghoa.

Sementara itu, pekerjaan grossir yang dahulunya hanya dilakukan oleh bangsa asing dengan kerjasama antara jawatan-

memperbaiki sarana angkutan laut terutama perkapalan pesisir. Keterangan selanjutnya dapat dibaca dalam: Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hal. 224-227.

²³Lebih jauh tentang System Benteng, lihat: Bingar Setiawidi dan Bondan Kanumayasa, "Benteng, Ekonomi, dan Politik: Tinjauan Tentang Politik Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal" (Ujungpandang: Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Mahasiswa Sejarah IV dan Munas I FORKOMASA di Unhas pada tanggal 27-31 Juli 1993).

²⁴Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 401-405.

jawatan Perekonomian dan Dewan Ekonomi Indonesia di Makassar, kini beberapa perusahaan Indonesia juga ditunjuk sebagai grossir, seperti: N.V. Pusat Penjual Gula Indonesia di Makassar dan N.V. Serdid di Makassar untuk barang-barang produksi perusahaan Unilever. Di samping itu telah terdapat 4 penyalur mobil dan 8 usaha penggilingan padi yang sebelum Perang Dunia II hanya beberapa yang dimiliki oleh orang Indonesia. ²⁵

Selanjutnya, untuk menampung para bekas anggota angkatan perang, badan pembantu angkatan perang, dan badan-badan perjuangan bersenjata yang belum mempunyai pekerjaan maka dibentuklah Dewan Rekonstruksi Nasional (DRN) dan Biro Rekonstruksi Nasional (BRN).²⁶ Melalui BRN ini pemerintah memberikan kredit ringan untuk mendirikan perusahaan dan usaha-usaha lainnya yang pengembaliannya dilakukan dengan angsuran ringan. Perbedaan dengan kredit yang diberikan oleh Bank-Bank ialah bekas pejuang bersenjata tidak diminta jaminan, seperti rumah, sertifikat tanah, tetapi sekadar kepercayaan.²⁷

Dalam masa awal berdirinya, BRN telah memiliki 16 buah perusahaan besar dan kecil seperti pabrik kerupuk, pabrik

²⁵*Ibid.*, hal. 405.

²⁶*Ibid.*, hal. 471. BRN adalah suatu Jawatan Agung yang kangsung di bawah Kabinet Perdana Menteri yang dibentuk berdasarkan P.P. No. 12 tahun 1951 yang kemudian diganti dengan P.P. No. 1/1952.

²⁷*Ibid.*, hal. 471.



rokok, pertukangan kayu, pertukangan besi, pengangkutan bermotor, dan lain-lain. Dan sejak Agustus 1952 Pemerintah telah mengambil alih N.V. Constructie Werkplaats en Metaalgieterij Tello²⁸ di bawah pimpinan BRN. Juga pada tanggal 19 Januari 1953 telah dibuka sebuah pabrik kulit di Jalan Mardekaya Gang 103 No. 5 Makassar.²⁹ Namun demikian, hampir sepanjang tahun 1955, BRN menghadapi masalah dengan adanya isu kecurangan dalam pengelolaan keuangan sebanyak Rp 9 juta³⁰ disamping gagalnya dalam mengelola berbagai usaha yang menurut A.R. Tamma³¹ tidak hanya disebabkan oleh persoalan keuangan dan tenaga ahli, tetapi juga oleh karena adanya kaum avonturier yang tidak jujur disinyalir

²⁸Lihat: "Objek BRN di Tello hasilkan Rp 70 ribu sebulannya" dalam: *Pedoman Rakjat* (28 September 1955). Dalam surat kabar tersebut diberitakan bahwa objek BRN di Tello telah menghasilkan Rp 70 ribu sebulannya. Dan galangan kapal yang berada di bawah pengawasan BRN, menurut Kepala Urusan Rekonstruksi dari Kantor Gubernur Sulawesi berangsur-angsur telah berjalan seperti yang dikehendaki.

²⁹Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 362; 471-172.

³⁰Mengenai isu kecurangan pengelolaan uang Rp 9 juta itu baca: "Soal Uang Rp 9 Juta Akan Diselesaikan" dalam: *Pedoman Rakjat* (17 Januari 1955). Lihat juga "Soal Kekalutan Wang BRN Sebuah Daftar Panjang Diserahkan Pada Kejaksanaan" dalam: *Pedoman Rakjat* (20 September 1955) yang memberitakan telah dikirimnya sebuah daftar panjang pada kejaksanaan menyangkut kekacauan uang dalam BRN.

³¹H.A.R. Tamma adalah Kepala BRN yang pengangkatannya, baca: "A.R. Tamma Diangkat Sebagai Kepala BRN" dalam: *Marhaen* (14 Januari 1955).

bersembunyi dalam lingkungan BRN dengan berkedok dibawah nama pejuang.³²

Selain menampung para bekas pejuang kemerdekaan³³, perusahaan yang berada dibawah BRN tentunya juga menampung banyak buruh, baik buruh harian, buruh borongan, maupun buruh tetap.

³²Hal ini diterangkan panjang lebar oleh H.A.R. Tamma dalam kedudukannya sebagai wakil pejabat Kepala Bagian Rekonstruksi Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi. Lihat: "Ada Avonturier Yang Gagalkan Usaha BRN Sulawesi" dalam: *Pedoman Rakjat* (17 Januari 1955). Di samping itu, pada bulan Maret 1955 A.R. Tamma menjelaskan di hadapan wartawan *Timbangan*, bahwa kecurangan dalam jawatannya yang selalu dibesar-besarkan dalam harian kota ini (Makassar) adalah tidak dapat dibenarkan. Baca: "Djurubicara BRN Prosul Mengenai Kecurangan-Kecurangan di BRN" dalam: *Timbangan* (15 Maret 1955). Pernyataan itu menjadi sulit diterima mengingat pada harian yang lain diberitakan fakta tentang kekacauan dalam tubuh BRN tersebut. Mengenai apa dan bagaimana BRN secara detail diperlukan penelitian khusus.

³³Menurut hemat penulis, dibentuknya BRN merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah gerilya di Sulawesi Selatan.

B. PERKEMBANGAN POLITIK

1. Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Kesatuan

a. Proses Terbentuknya NIT

Sebelum sampai pada pembahasan tentang organisasi dan gerakan buruh di Makassar, perlu dipaparkan terlebih dahulu perkembangan politik secara umum, baik di Indonesia, maupun Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Dengan demikian, akan memudahkan untuk memahami bagaimana implikasi dari perkembangan politik terhadap gerakan buruh maupun implikasinya terhadap ketidaksatabilan ekonomi yang bermuara antara lain pada tuntutan peningkatan kesejahteraan buruh.

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, ternyata bukanlah akhir dari sebuah permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, karena segera setelah proklamasi tersebut usaha pencarian identitas baru harus segera dilakukan untuk merealisasikan cita-cita proklamasi di samping untuk menghadapi kembalinya kekuasaan asing. Dengan demikian, bermunculanlah suatu pertarungan sengit di antara individu-individu dan kekuatan-kekuatan sosial yang bertentangan, walaupun dibaliknya tersimpan kerinduan akan kemerdekaan yang sejati.

Pertentangan itu mulai terlihat ketika Soekarno yang dengan kharisma dan kemampuannya mampu mempengaruhi rakyat

mulai tidak dipercaya, khususnya oleh kaum revolusioner muda. Hal itu disebabkan oleh sikapnya yang terlalu berhati-hati sejak hendak dinyatakannya proklamasi kemerdekaan³⁴ dan terutama campur tangannya dalam menetapkan gencatan senjata di Magelang dan Surabaya atas permintaan Inggeris.³⁵

Dalam situasi seperti itu, muncullah Sutan Sjahrir, seorang tokoh muda revolusioner yang tidak pernah bekerjasama dengan pihak Jepang. Dari tulisannya yang berjudul "Perjuangan Kita" menunjukkan, bahwa Sjahrir adalah anti bangsawan dan anti fasis yang tentunya secara implisit menentang orang-orang yang telah mengagumi gagasan Jepang seperti Soekarno. Akhirnya, pada tanggal 14 November 1945 dibentuklah kabinet baru dengan Sjahrir sebagai Perdana Menteri (1945-1947) merangkap sebagai

³⁴Ingat ketika Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok dengan dalih untuk melindungi mereka bilamana meletus suatu pembontakan Peta dan Heiho. Ternyata tidak terjadi suatu pembontakanpun, sehingga Soekarno dan Hatta segera menyadari bahwa ini merupakan satu usaha untuk memaksa mereka agar menyatakan kemerdekaan di luar rencana pihak Jepang (awal bulan September), namun demikian tujuan itu mereka tolak. Untuk keterangan lebih jauh, lihat: M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hal. 315.

³⁵*Ibid.*, hal. 325-326. Ketika terjadi pertempuran di Surabaya melawan sekutu, kira-kira 6000 pasukan Inggeris yang terdiri atas serdadu-serdadu India tiba pada tanggal 25 Oktober untuk mengungsikan para tawanan. Dan sekitar 20.000 anggota Tentara Keamanan Rakyat reguler yang baru saja terbentuk dan sebanyak lebih kurang 120.000 orang dari badan-badan perjuangan, meskipun persenjataan mereka sangat tidak memadai, tampaknya siap membantai prajurit-prajurit India itu. Karenanya, pihak Inggeris mendatangkan Soekarno dan Hatta untuk menetapkan gencatan senjata. Gencatan senjata tersebut ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 1945. Baca juga: Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani* (Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1993), hal. 145, 149.

menteri Luar Negeri dan Dalam Negeri. Sementara itu, Soekarno, Hatta, dan para pemimpin lainnya terdesak ke belakang, dan Sjahrir, Amir, serta para pengikut mereka memperoleh kekuasaan di pusat.³⁶ Namun demikian, bekas-bekas menteri dalam kabinet Soekarno seperti Chairul Saleh tidak dapat menerima kenyataan itu dan mereka juga marah karena tulisan Sjahrir (baca: Perjuangan Kita) yang menamakan mereka sebagai anjing dan kaki tangan Jepang.³⁷

Pertentangan itu memuncak ketika tentara juga muncul sebagai suatu kekuatan politik yang juga menyimpan konflik antar kelompok. Kelompok pertama adalah mereka para mantan

³⁶M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hal. 327-328. Walaupun demikian, keduanya (Soekarno-Hatta sebagai pimpinan negara dan Sjahrir sebagai pimpinan pemerintahan) tetap melakukan konsolidasi, baik secara administrasi politik, maupun dalam mendapatkan dukungan rakyat. Karenanya, pada bulan Desember, mereka (Soekarno-Hatta dan Sjahrir) melakukan perjalanan ke seluruh Pulau Jawa untuk mengadakan rapat umum agar rakyat dan pimpinan daerah merasakan dan mengakui adanya pemerintah pusat. Lebih jauh tentang konsolidasi ini, baca: Soebadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), hal. 194-200.

³⁷*Ibid.*, hal. 188-189. Pernyataan ketidaksenangan dari menteri-menteri bekas kabinet Soekarno itu terungkap pada kesempatan pandangan umum dari anggota-anggota ketika berlangsung pertanggungjawaban Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), khususnya menyangkut dua pokok persoalan, yakni:

1. Kebijakan presiden yang menerima baik usul Badan Pekerja untuk mengadakan kabinet parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP dan menggantikan kabinet Soekarno dengan kabinet Sjahrir.
2. Diangkatnya beberapa anggota Perhimpunan Indonesia (PI) yang baru pulang dari Negeri Belanda dan orang-orang pergerakan yang pulang dari Australia yang semula dibuang ke Digul kemudian selama Perang Dunia II bekerjasama dengan Belanda melawan negara-negara Poros fasis Jerman, Italia dan Jepang di Australia yang di antaranya ikut dalam mendirikan organisasi Sibar, anggota KNIP.

perajurit Peta dan Heiho serta laskar-laskar liar yang tidak pernah mendapat latihan militer, tetapi diilhami semangat revolusi dan terlatih untuk gerilya. Kelompok ini terutama diwakili oleh Soedirman yang dipilih sebagai panglima besar pada bulan November 1945. Kelompok kedua adalah mereka para mantan serdadu Belanda yang lebih terlatih untuk pekerjaan staf dan lebih profesional. Kelompok ini meliputi antara lain A.H. Nasution dan T.B. Simatupang. Pada akhir Juni dan awal Juli 1946 terjadilah aksi tangkap menangkap di antara kedua kubu tersebut.³⁸

Sementara itu, dengan terpilihnya Sjahrir sebagai Perdana Menteri memberi keluasan dan wewenang baginya untuk melakukan perundingan dengan pihak Inggris dan Belanda yang sebelumnya timbul kesulitan karena sikap Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno, karena dianggapnya sebagai kolaborator Jepang.

Perundingan-perundingan yang dilakukan Sjahrir dan van Mook tidak banyak menampakkan hasil sehingga van Mook mulai mengalihkan perhatiannya dalam penataan ketatanegaraan di luar wilayah Republik Indonesia. Demikianlah, maka pada tanggal 16-18 Juli 1946 berlangsung suatu perundingan antara wakil-wakil pemerintah Belanda bersama wakil-wakil dari wilayah bagian Timur Indonesia³⁹. Perundingan tersebut terkenal dengan

³⁸Untuk kasus ini, baca: M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hal.333-336

³⁹Nama-nama wakil kedua belah pihak dapat dilihat dalam Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hal. 99-102.

konperensi Malino.⁴⁰

Selanjutnya, pada tanggal 12 November di Linggarjati (dekat Cirebon), Belanda mengakui kekuasaan Republik secara defacto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Dan pemerintah Belanda bersama Indonesia akan mendirikan Negara Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949 serta Negara Indonesia Serikat dan Belanda akan dihubungkan dalam suatu uni Indonesia-Belanda.⁴¹

Tampaknya, perjanjian Linggarjati lebih memberikan peluang bagi terwujudnya Negara Indonesia Timur. Untuk itu, maka pada tanggal 7-24 Desember 1946 dilangsungkanlah Konperensi Denpasar yang dihadiri oleh wakil-wakil rakyat dari Indonesia Timur untuk mendirikan suatu kesatuan ketatanegaraan di dalam lingkungan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat sesuai dengan pasal 2 dan pasal 4 dari persetujuan Linggarjati. Dengan demikian, pada tanggal 24 Desember 1946 berdirilah NIT dengan ibukota Makassar.⁴²

⁴⁰Malino, dalam bahasa bugis berarti "tempat yang sepi atau damai". Suatu tempat peristirahatan yang terletak lebih kurang 70 km dari kota Makassar. Tempat ini dibangun oleh Gubernur J. Caron pada tahun 1932 ketika menjabat sebagai gubernur di Sulawesi.

⁴¹C.S.T. Kansil dan Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1990), hal. 48-49. Baca juga: M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hal. 337. Perundingan di Linggarjati ini berhasil dilaksanakan atas usaha Inggeris, lihat: Kuntowijoyo, *loc. cit.*

⁴²Ide Anak Agung Gde Agung, "Negara Kesatuan: Negara Indonesia Timur". (Malino, Gowa: Makalah disampaikan pada Seminar Sejarah Regional Indonesia Timur pada tanggal 16-17 Juli 1992 yang diselenggarakan atas kerjasama MSI Cabang Sulsel dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujungpandang), hal. 2. Tentang jalannya Konperensi Denpasar

Dalam perkembangan berikutnya, perjalanan NIT tidaklah mulus. Perpecahan yang nampaknya sudah mulai muncul sejak pemilihan presiden⁴³ kian marak. Mosi tidak percaya terhadap satu kabinet yang sedang berkuasapun menjadi ramai dilancarkan, sehingga tidak satupun kabinet yang dapat bertahan lama.⁴⁴

dapat dibaca dalam: Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*, hal. 88-102. Lihat juga: Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia...*, hal. 122-179.

⁴³*Ibid.*, hal. 169-171. Pemilihan presiden NIT dimulai dengan pencalonan sebanyak tiga orang, masing-masing: Tjokorde Gde Rake Soekawati, Tadjoeuddin Noor, dan Nadjamuddin Daeng Malewa. Pada pemilihan pertama, Soekawati mendapat 31 suara, Tadjoeuddin Noor 24 suara dan Nadjamuddin Dg. Malewa 13 suara. Karena tidak ada calon yang mendapat jumlah suara 2/3 dari jumlah suara yang hadir, yaitu 46 suara, maka berdasarkan peraturan pemilihan kepala negara diadakan pemilihan ulangan. Pada pemilihan ulangan itu, Nadjamuddin Dg. Malewa gugur karena hanya mengantongi 6 suara, sedangkan Soekawati dan Tadjoeuddin Noor maju pada pemilihan berikutnya dengan masing-masing 31 suara. Hasil pemilihan ketiga ini dimenangkan oleh Soekawati dengan 36 suara sedang Tadjoeuddin Noor memperoleh 32 suara. Soekawati adalah seorang moderat yang menginginkan adanya kerjasama dengan Belanda sedangkan Tajoeddin Noor adalah seorang pemimpin yang berasal dari Kalimantan Timur yang sangat pro pada republik.

⁴⁴*Ibid.*, hal. 812-816. Selama pemerintahan NIT, terjadi delapan kali pergantian kabinet, masing-masing:

1. Kabinet Nadjamoeddin Daeng Malewa Pertama, 13 Januari - 2 Juni 1947.
 2. Kabinet Nadjamuddin Dg. Malewa Kedua, 2 Juni - 4 Oktober 1949
 3. Kabinet S.J. Warrow, 11 Oktober - 15 Desember 1947
 4. Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung Pertama, 15 Desember 1947 - 12 Januari 1949
 5. Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung Kedua, 12 Januari 1949 - 27 Desember 1949
 6. Kabinet J.E. Tatengkeng, 27 Desember 1949 - 14 Maret 1950
 7. Kabinet D.P. Diapari, 14 Maret - 10 Mei 1950
 8. Kabinet J. Poetohena, 10 Mei - 16 Agustus 1950
- Jumlah anggota kabinet (menteri) dari masing-masing kabinet tidaklah sama. Kabinet Anak Agung Pertama adalah kabinet yang paling banyak memiliki menteri, yakni 16 orang.

Sementara itu, pertikaian-pertikaian politik antara Indonesia dan Belanda tetap saja berlangsung, terutama disebabkan oleh pihak Belanda yang terang-terangan melanggar persetujuan Linggarjati. Pelanggaran tersebut misalnya terjadi pada bulan Mei 1947 ketika Belanda memutuskan untuk mengadakan serangan terhadap Indonesia. Dan pada tanggal 21 Juli 1947, pihak Belanda melancarkan aksinya dengan mengerahkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udaranya. Aksi yang terkenal dengan nama Agresi Militer Belanda I itu disusul dengan Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948.⁴⁵

Akhirnya, pertikaian Indonesia-Belanda diselesaikan dalam Konperensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus - 2 Nopember 1949 di Hague Den Haag. Konperensi yang turut dihadiri delegasi NIT⁴⁶ itu memutuskan terbentuknya Republik Indonesia

⁴⁵Kontowijoyo, *op. cit.*, hal. 154, 160. Dalam Agresi Militer I (21 Juli 1947) tentara Belanda dilengkapi dengan perlengkapan Amerika yang berasal dari surplus perang dan *lend-lease*, dengan 100.000 sampai 120.000 personal, melawan 200.000 tentara nasional Indonesia. Belanda menyebut agresi itu sebagai tindakan kepolisian Indonesia. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan penyeselannya dan secara tersirat menyalahkan Belanda. Sedangkan dalam Agresi Militer II (19 Desember 1948), Belanda mengumumkan bahwa tujuannya adalah untuk menumpas kaum ekstremis dan kaum komunis yang banyak terdapat di dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Memang, pada mulanya pihak Belanda menawarkan bantuannya kepada Republik untuk menumpas pembontakan tersebut PKI di Madiun. Tetapi, Hatta menolak tawaran itu, karena menurutnya pembontakan tersebut adalah urusan dalam negeri Indonesia, olehnya itu biarlah diselesaikan oleh Indonesia sendiri. Lihat: Soebagija I.N., *Sudiro Pejuang Tanpa Henti* (Jakarta: Gunung Agung, 1981), hal. 208. Sedangkan untuk pembontakan PKI di Madiun dapat dibaca dalam: *Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990).

⁴⁶Delegasi Negara Indonesia Timur (NIT) yang mengikuti KMB diputuskan dalam pertemuan antara pemerintah NIT dengan Panitia

dan negara-negara federal (termasuk NIT), walaupun perjanjian itu banyak merugikan Indonesia.⁴⁷ Pada tanggal 27 Desember 1949 negeri Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (tidak termasuk Irian Jaya).

Dalam pada itu, se usai upacara perayaan Hari Ulang Tahun ke-3 NIT, Perdana Menteri Anak Agung mengundurkan diri dari jabatannya, karena terpilih sebagai Menteri Dalam Negeri pada kabinet RIS pertama yang dipimpin oleh Drs. Muhammad Hatta. Sehubungan dengan itu, kedudukan Perdana Menteri NIT dijabatkan kepada J.E. Tatengkeng⁴⁸. Anak Agung dalam hal ini dapat dipandang sebagai Perdana Menteri yang mengantar NIT menuju RIS yang merdeka dan berdaulat.

Permusyawaratan Parlemen pada bulan Juli 1949. Delegasi tersebut antara lain: Ide Anak Agung Gde Agung (Ketua), J.E. Tatengkeng (Wakil Ketua), ditambah delapan anggota lainnya. Susunan selengkapnya, lihat: Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia ...*, hal. 609-610.

⁴⁷Kuntowijoyo, *op. cit.*, hal. 165. Kerugian tersebut adalah Pertama, Indonesia yang miskin dan mengalami kehancuran diharuskan membayar utang Hindia Belanda yang dipakai untuk membiayai perangnya melawan Indonesia. Kedua, tidak ada persetujuan untuk penanganan status Irian Barat (sekarang Irian Jaya).

⁴⁸Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hal. 693. Permohonan pengunduran diri Anak Agung bersama anggota kabinetnya dilakukan setelah Perayaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-3 NIT, pada tanggal 24 Desember 1949 di Makassar. Selanjutnya, Presiden Soekawati menunjuk J.E. Tatengkeng (Menteri Pendidikan dalam kabinet Anak Agung) sebagai Perdana Menteri baru.

2. Menuju ke Negara Kesatuan

Penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, disambut dengan gembira oleh masyarakat di Negara Indonesia Timur (NIT), khususnya di Makassar.⁴⁹ Pejuang-pejuang kemerdekaan yang sebelumnya mendekam dalam penjara dan pengasingan, menjelang atau sesudah penyerahan kedaulatan dilepas. Andi Djemma (Datu Luwu), Sultan Daeng Raja (Karaeng Gantarang) dan Podjanga Daeng Ngalla (Karaeng Bulukumba) yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin perjuangan di Sulawesi Selatan melawan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) pada tahun 1946 disambut dan diterima oleh rakyat dengan perasaan suka cita.⁵⁰

Dapatlah dikatakan, bahwa suasana politik pada masa awal setelah penyerahan kedaulatan itu cukup stabil. Namun demikian, situasi politik yang stabil itu tidak berlangsung lama. Sekitar akhir Januari 1950 berbagai aksi yang menuntut dibubarkannya

⁴⁹Suasana pada saat penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949 dapat ditemukan dalam laporan politik Majelis Harian Hadat Tinggi Sulawesi Selatan bulan Pebruari 1949, antara lain tertulis: "Masa warta ini menjadi masa percobaan dalam arti kata membenarkan dan mengisi kemerdekaan dan kedaulatan yang baru diterima dengan sepenuhnya pada akhir bulan Desember. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa permulaan ini berhasil denganm keamanan dan ketertiban umum dapat dipertahankan, baik: insiden-insiden yang membahayakan masyarakat tidak terjadi...." Lihat: Arsip: Arnas Perw. Sul-Sel. Arsip Pemerintahan Indonesia Timur 1946-1950. Reg. 104. Lihat juga: Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur Ke Negara Indonesia Serikat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hal. 698-699.

⁵⁰*Ibid.*, hal. 700.

NIT semakin memuncak. Bahkan kabinet yang dipimpin oleh J.E. Tatengkeng (27 Desember 1949 - 14 Maret 1950) sebagai kabinet pertama NIT dalam lingkungan RIS dan kabinet D.P. Diapari (14 Maret - 10 Mei 1950) tidak henti-hentinya mendapat tekanan untuk membubarkan NIT. Bahkan kabinet Diapari dipaksa turun setelah memerintah hanya dengan lebih kurang 64 hari.

Antara bulan Januari - Mei 1950, golongan unitaris melancarkan beberapa aksi yang menuntut dibubarkannya NIT, baik melalui demonstrasi, rapat umum, maupun melalui aksi pemasangan pamflet.⁵¹ Bahkan pada tanggal 17 April 1950, di Polobangkeng berlangsung proklamasi yang isinya melepaskan diri dari kekuasaan Undang-undang dan Pemerintahan NIT dan akan mempertahankan daerah-daerah kekuasaan di NIT sebagai bagian RI.⁵²

Sebaliknya, oposisi terhadap gerakan ke arah negara persatuan juga gencar. Di NIT yang banyak orang Ambon beragama Kristen adalah pro-Belanda dan menentang pembubaran NIT. Mereka menganggap republik sebagai sebuah negara yang

⁵¹Pamflet yang berisi tuntutan pembubaran NIT, penulis temukan tidak kurang dari 12 buah (mungkin masih banyak yang lain) dan kesemuanya dapat dibaca dalam: Arsip: Arnas Perw. Sul-Sel, Arsip Pemerintah Indonesia Timur 1946-1950, Reg. 153. Selain aksi pemasangan pamflet, juga dilakukan demonstrasi dan rapat raksasa. Aksi-aksi serupa juga terjadi di Gorontalo, Poso, Donggala, Takalar, Jeneponto, dan lain-lain.

⁵²Arsip: Arnas Perw. Sul-Sel., Arsip Pemerintahan Indonesia Timur, Reg. 153.

didominasi oleh orang Jawa, kaum muslimin, dan tokoh-tokoh yang mereka pandang berhaluan kiri.⁵³

Pada tanggal 5 April 1950, terjadilah bentrokan antara Kapten Andi Azis dengan kompiunya yang dibantu oleh lebih kurang 300 anggota KNIL suku Ambon dengan pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang mendukung ide negara kesatuan. Peristiwa yang sekaligus merupakan lonceng kematian bagi NIT, selanjutnya dikenal sebagai peristiwa Andi Azis.⁵⁴

Akibat gagalnya aksi Andi Azis maka Soumokil⁵⁵ yang sangat aktif memprakarsai rapat untuk menentang kedatangan APRIS, meninggalkan Makassar ke Ambon. Di Maluku, aktivitasnya untuk menentang negara kesatuan ternyata terus berlanjut yang dibuktikan dengan usahanya memproklamasikan Republik Maluku Selatan di Ambon pada tanggal 25 April 1950.⁵⁶

Di samping itu, akibat dari peristiwa Andi Azis maka kabinet Diapari harus bubar pada bulan April 1950.⁵⁷ dan

⁵³M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hal. 351.

⁵⁴Mengenai peristiwa Andi Azis dapat dibaca dalam: Arsip: Arnas Perw. Sul-Sel. Warta Politik NIT Reg. 97. Baca juga: Barbara Sillars Harvey, *Pembrontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke DI/TII* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hal. 163-168. Penekanan pada dilema yang dihadapi Andi Azis, baca: Sritimuryati, "Peristiwa Andi Azis, Dilema Federalis dan Unitaris" (Ujungpandang: Skripsi pada Fakultas Sastra Unhas, 1986).

⁵⁵Mr. Dr. Ch. R. S. Soumokil adalah mantan menteri kehakiman NIT pada saat kabinet Nadjamuddin Dg. Malewa Kedua, Kabinet Warrow, Kabinet Anak Agung Pertama dan Kedua, dan pada saat kabinet Tatengkeng. Lihat: Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia ...*, hal. 813-815.

⁵⁶*Ibid.*, hal. 749 dan M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hal. 351-352.

⁵⁷Barbara Sillars Harvey, *op. cit.*, hal. 171.

Diapari harus mengakhiri karir politiknya dengan tragis, karena di samping kejatuhannya adalah diakibatkan oleh mosi yang diajukan oleh pimpinan fraksi kerakyatan - Poepella⁵⁸ - yang termasuk dalam koalisi pemerintahannya, juga karena pada masa demisionernya (2 Mei 1950) Diapari dan beberapa anggota kabinetnya serta pemuka-pemuka golongan federalis, ditahan atas perintah jaksa agung RIS dengan tuduhan terlibat dalam peristiwa Andi Azis.⁵⁹

Sebagai pengganti kabinet Diapari, ditunjuklah Ir. Putuhena untuk membentuk kabinet dan dilantik oleh akting Presiden NIT Husain Puang Limboro pada tanggal 10 Mei 1950.⁶⁰ Kabinet Putuhena adalah merupakan "Kabinet Likuidasi" dengan program "Memasukkan NIT dalam Negara Kesatuan selekas-lekasnya

⁵⁸Poepella adalah pimpinan fraksi kerakyatan yang berkoalisi dengan Fraksi Nasional Progresif dan Fraksi Sosialis. Ketiga fraksi ini adalah pendukung federalis. Diapari sendiri adalah dari Fraksi Nasional Progresif. Lihat: Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia ...*, hal. 711, 745.

⁵⁹*Ibid.*, hal., 752.

⁶⁰*Ibid.*, hal. 753-754. Dilantiknya kabinet Ir. J. Putuhena oleh Husain Puang Limboro (Ketua Badan Perwakilan Rakyat) yang bertindak sebagai Pejabat Presiden NIT, karena setelah selesai bertindak sebagai Pejabat Presiden NIT, karena setelah selesai pembicaraan segi tiga antara delegasi pemerintah federal (dipimpin oleh Hatta) dengan wakil-wakil dari NIT (Soekawati), Negara Sumatera Timur (Dr. T. Mansoer) tanggal 4-5 Mei 1950, presiden Soekawati tidak kembali lagi ke Makassar, akan tetapi menetap di Jakarta. Sedangkan prihal kepala negara (presiden) yang berhalangan atau sakit akan digantikan sementara oleh ketua parlemen, diatur dalam Peraturan Pembentukan NIT Bab III, Pasal 17. *Ibid.*, hal. 796.

sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945.⁶¹

Nampaknya, walaupun kabinet Putuhena telah menetapkan program kerja utamanya untuk memasukkan NIT ke dalam negara kesatuan, rakyat dan khususnya pemuda-pemuda tidak sabar menanti saat pembubaran tersebut. Dengan demikian ketegangan-ketegangan tidak dapat dihindari, terlebih dengan masih banyaknya berkeliaran di Makassar pasukan Ambon-bekas KNIL yang akibat proklamasi RMS membuat mereka resah dan sangat gelisah.

Di kalangan pemuda sendiri timbul keinginan untuk melucuti senjata yang berada di tangsi mereka. Akibatnya, pada tanggal 14-16 Mei⁶² terjadilah insiden antara pemuda-pemuda dengan KNIL. Peristiwa itu terulang kembali pada tanggal 5 Agustus yang mengakibatkan banyaknya korban yang jatuh, termasuk Mochtar Lutfi.⁶³

⁶¹Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 171. Dalam "Kabinet Likwidasi" ini terdapat orang-orang pro-Republik terkenal seperti Lanto Daeng Pasewang sebagai Menteri Dalam Negeri, Andi Burhanuddin sebagai Menteri Urusan Sosial, dan Henk Rondonuwu sebagai Menteri Penerangan. Lihat: Barbara Sillars Harvey, *loc. cit.*

⁶²Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hal. 756. Peristiwa ini terkenal dengan nama Peristiwa 5 Agustus. Keterangan lebih jauh tentang peristiwa ini (jalannya peristiwa, kerugian yang ditimbulkannya, serta tanggapan pers), baca: Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 310-333.

⁶³*Ibid.*, hal. 607-611. Mochtar Lutfi adalah mantan anggota Badan Perwakilan Sementara NIT, dan terkenal sebagai salah seorang pemuka Islam. Beliau adalah pemrakarsa dan pendorong berdirinya Mesjid Raya Makassar.

Sementara itu, pembicaraan dan persiapan ke arah pembentukan negara kesatuan RI, berjalan intensif antara Perdana Menteri RIS (Hatta) dengan Perdana Menteri RI (Halim) di Jakarta.⁶⁴ Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1950, di hadapan sidang DPRS dan Senat bertempat di Jakarta, Presiden Soekarno memproklamasikan terbentuknya Negara Kesatuan RI dan Perdana Menteri Hatta (PM RIS) bersama kabinetnya mengundurkan diri.⁶⁵

Di Makassar, pada tanggal 16 Agustus 1950 Perdana Menteri NIT Ir. J. Putuhena dan seluruh kabinetnya meletakkan jabatan. Pada hari itu juga Badan Perwakilan Rakyat (BPR) NIT dinyatakan bubar.⁶⁶ Dengan demikian, tamatlah riwayat NIT yang selama kurang lebih tiga tahun turut mewarnai "atmosfir" Indonesia. Dan "impian" untuk menjadikan Indonesia sebagai negara federal akhirnya memang hanya sebuah mimpi. Lalu, apakah mimpi itu masih mungkin terwujud? hanya sejarah yang akan membuktikannya.

2. Keadaan Politik Pasca Negara Indonesia Timur

a. Masalah Penyelesaian Gerilya

Bubaranya NIT dan kembalinya ke negara kesatuan ternyata bukanlah akhir dari sebuah permasalahan. Masalah pertama yang

⁶⁴Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia...*, hal. 765-771.

⁶⁵Ide Anak Agung Gde Agung, *Negara Kesatuan: Negara...*, hal. 18-19.

⁶⁶Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia...*, hal. 772.

bukanlah akhir dari sebuah permasalahan. Masalah pertama yang dihadapi oleh akting Gubernur B.W. Lapien sebagai gubernur pertama setelah kembali menjadi negara kesatuan adalah penyelesaian masalah gerilya.

Sebagaimana diketahui, menjelang penempatan Komisi Militer oleh pemerintah pusat di wilayah Indonesia Timur, oleh pimpinan badan perjuangan Lasjkar Pembrontak Rakjat Indonesia Sulawesi (LAPRIS)⁶⁷ memulai mengorganisasikan kembali anggota-anggotanya dengan tujuan: 1) Menyiapkan diri dan mengumpulkan kekuatan guna membantu Tentara Nasional Indonesia dalam pendaratannya di Sul-Sel, dan 2) Meminta kepada pemerintah agar mereka diakui dahulu sebagai tentara R.I. (TNI) sebelum kembali ke masyarakat.⁶⁸

Dalam pada itu, di tengah-tengah usaha penyelesaian Perang Kemerdekaan dalam menghadapi Belanda melalui KMB, pada bulan April 1949 Letnan Kolonel Abdul Kahar Muzakkar dalam kedudukannya sebagai Komandan Groep Seberang menugaskan kepada Letnan Satu Saleh Sjahban untuk mengadakan persiapan pembentukan KGSS. Pada bulan Agustus 1949, dalam suatu

⁶⁷LAPRIS terbentuk atas inisiatif Lipan Bajeng. Konperensi pembentukannya yang terkenal dengan nama "Konperensi Rannaya" dihadiri oleh 19 organisasi kelasykaran, dan kemudian ditambah menjadi 26 buah. Jumlah anggotanya tercatat sebanyak 20.000 orang yang tersebar di seluruh pelosok daerah Sulawesi Selatan. Lihat: Harun Kadir, et.al., *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan* (Ujungpandang: Depdikbud, 1978), hal. 102-103.

⁶⁸Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 335.

konperensi komandan-komandan kelasjkan di Maros, terbetuklah KGSS.⁶⁹

Segera setelah Letnan Kolonel Mokoginta berada di Makassar pada bulan Desember 1949, diajukanlah permintaan agar yang ingin terus menjadi tentara diakui sebagai TNI. Namun demikian, permintaan tersebut ditolak oleh Komisi Militer.⁷⁰ Penolakan itu berdasarkan keinginan pemerintah Hatta untuk mengurangi jumlah anggota angkatan bersenjata yang sangat besar, yang diperkirakan sekitar 350.000 tentara reguler dan 470.000 tentara tidak reguler yang menjadi tanggungjawabnya.⁷¹

Sebagai akibat dari penolakan itu timbulah perasaan kecewa dalam kalangan gerilyawan dan akhirnya berkembang menjadi masalah yang sangat rumit antara pemerintah dan pihak KGSS. Kekecewaan itu semakin menjadi-jadi ketika pasukan Andi Azis yang nota bene adalah pasukan KNIL dilantik menjadi pasukan APRIS pada tanggal 30 Maret 1950.⁷²

⁶⁹Anhar Gonggong, *Abdul Gahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pembontak* (Jakarta: Grasindo, 1992), hal. 94.

⁷⁰*Ibid.*, hal. 95.

⁷¹M.C. Ricklefs, *op. cit.*, hal. 343.

⁷²Harun Kadir, et.al., *op. cit.*, hal. 104. Kaum gerilyawan yang kecewa dan tersinggung oleh palantikan Andi Azis dan pasukan KNIL-nya itu, sekarang merasa bahwa mereka memperoleh pembenaran untuk kecurigaan mereka semula. Lihat: Barbara Sillars Harvey, *op. cit.*, hal. 171-172. Kekecewaan dan kejengkelan kaum gerilyawan tersebut juga ditujukan kepada polisi yang melindungi pasukan Andi Azis. Sementara anggota gerilya yang masuk kota untuk menyerang tangsi mereka dihalangi

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, berbagai upaya penyelesaian telah ditempuh seperti diutusnya Kahar Muzakkar oleh Panglima Teritorial VII Kolonel Kawilarang ke pedalaman untuk mencari penyelesaian dengan pasukan gerilya. Namun demikian, semua usaha yang dilakukan tidak membawa hasil. Bahkan akibat ditolakny a usul pihak gerilya lewat Kahar Muzakkar, agar di Sul-Sel dibentuk Brigade TNI yang terdiri dari bekas-bekas gerilya Sul-Sel dengan nama Brigade Hasanuddin, Kahar Muzakkar memilih untuk melepaskan diri dari ikatan Angkatan Perang pada hari itu juga (1 Juli 1950).⁷³ Dengan demikian, mulailah petualangan Kahar Mudzakkar bersama gerilyawan yang lain di hutan-hutan.

Sementara itu, ketegangan-ketegangan semakin memuncak menyusul terjadinya serangkaian pembrontakan dari serdadu KNIL (Peristiwa 5 Agustus 1950) di samping adanya perintah dari pimpinan Angkatan Perang setempat agar pihak gerilya menyerahkan senjatanya. Yang tidak memenuhi perintah akan diambil tindakan seperlunya. Olehnya itu, beberapa pimpinan

dengan tembakan-tembakan. Untuk keterangan selengkapnya, baca: Arsip: Arnas Perw. Sul-Sel. Arsip Pemerintah Indonesia Timur 1946-1950, Reg. 153.

⁷³Dalam rapat pada tanggal 1 Juli 1950 tersebut, panglima (Kol. Kawilarang) mengeluarkan suatu dekrit yang terkenal dengan nama "decreet Kawilarang", antara lain berisi bahwa KGSS dan lain-lain organisasi gerilya di luar APRIS dianggap telah bubar dan segala usaha untuk melanjutkan dan menghidupkan kembali organisasi tersebut, termasuk larangan tentara. Lihat: Anhar Gonggong, *op. cit.*, hal. 96.

pemimpin gerilya mati tertembak, seperti Arief Rate, Abbas Bangsawan, dan Mustajab.⁷⁴

Akibat semakin meruncingnya ketegangan ini, maka dua hari setelah Ir. J. Putuhena meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri NIT yang sekaligus menandai bubarnya NIT pada tanggal 18 Agustus 1950 DPRD Sulawesi Selatan berkumpul bersama 21 partai dan organisasi di Makassar untuk membicarakan penyelesaian masalah gerilya yang sebelumnya telah diajukan oleh pihak partai. Hasil dari pertemuan itu, adalah terbentuknya satu komisi jasa baik APRI-GERILYA yang diketuai oleh Ny. Salawati⁷⁵.

Masalah ini berlarut sampai Lopian digantikan oleh Gubernur Sudiro (Juli 1951). Seperti halnya ketika gubernur Lopian menjadi gubernur, Sudiro-pun berusaha menyelesaikan masalah ini,⁷⁶ namun akhirnya juga menemui kegagalan. Justru pada bulan Agustus 1953⁷⁷ Kahar Muzakkar memproklamasikan Sulawesi sebagai bagian dari Darul Islam/Tentara Islam

⁷⁴Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 339.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Sudiro ketika menjabat sebagai gubernur Sulawesi (1951-akhir 1953), dapat dibaca dalam : Soebagijo I.N., *op. cit.*, hal. 230-244.

⁷⁷Ketika Kahar Muzakkar menyatakan diri menjadi bagian dari gerakan DI/TII pimpinan Kartosuwirjo (17 Agustus 1953) terjadi perubahan mendasar pada gerakannya. Gerakan Kartosuwirjo sendiri bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Dengan demikian, perubahan tersebut terjadi setidaknya-tidaknya pada dua hal, yakni masalah ideologi dan tujuan gerakan. Untuk lebih jelasnya, baca: Anhar Gonggong, *op. cit.*, hal., 123.

yang dipimpin oleh Kartosuwirjo di Jawa Barat. Pemberontakan itu berlanjut hingga Kahar Muzakkar ditembak mati oleh TNI pada tanggal 3 Pebruari 1965.⁷⁸

Masalah kedua yang dihadapi oleh Akting Gubernur Lapian adalah penataan kembali struktur pemerintahan, khususnya menyangkut pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh propinsi Sulawesi, termasuk di Makassar. Untuk masalah pembentukan DPRD ini diuraikan di bawah sub bab: Partai Politik dan Kelompok Kepentingan Pasca NIT.

⁷⁸*Ibid.*, hal. 174. Kahar Mudzakkar tertembak mati di tempat persembunyiannya yang terletak di sebuah tempat di Sulawesi Tenggara. Ditemukannya tempat persembunyian Kahar Mudzakkar adalah atas informasi Letnan Kolonel TII Kadir Junus (seorang perwira terdekat Kahar Mudzakkar selama ini) yang pada bulan Januari menyerahkan diri. Selanjutnya, jasad Kahar Muzakkar dikirim ke Makassar dengan helikopter, dan kuburnya tidak pernah diungkapkan. Lihat: Barbara Sillars Harvey, *op. cit.*, hal. 328.

b. Partai Politik dan Kelompok Kepentingan Pasca NIT

Partai politik dan kelompok kepentingan timbul dari kesadaran warga negara agar kepentingan, kebutuhan, keinginan, dan harapan-harapan mereka dipenuhi oleh pemerintah. Mereka menyatakan atau mengartikulasikan kepentingannya kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.⁷⁹

Dengan demikian, bermunculanlah berbagai partai politik dan kelompok kepentingan yang pada awalnya timbul pada akhir abad ke-18 dan 19 di Eropa Barat. Di Indonesia, partai politik dan berbagai macam kelompok kepentingan seperti SDI (Sarekat Dagang Islam) yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (SI), Budi Utomo (BO), Muhammadiyah, Sarekat Kaum Buruh Indonesia, Partai Sosialis, dan lain-lain muncul sekitar awal abad ke-20 yang dalam perkembangan selanjutnya tumbuh bagai cendawan di musim hujan.⁸⁰

⁷⁹Gabriel A. Almond, "Kelompok Kepentingan dan Partai Politik" dalam: Mochtar Maso'ed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978), hal. 50.

⁸⁰Pada Pemilu September 1955 jumlah partai politik sebanyak 30 dan 28 di antaranya mendapat kursi. Hal itu menimbulkan berbagai kekecewaan dan kejutan. Bahkan Presiden Sukarno dalam pidatonya pada tanggal 28 Oktober 1956 di depan pertemuan wakil-wakil pemuda dari semua partai dan di depan kongres persatuan guru pada 30 Oktober 1956 menyerukan agar partai-partai dikubur, karena terlalu banyak partai menimbulkan "sikot-sikutan" antara partai satu dengan lainnya. Selanjutnya, lihat: M.C. Ricklefs, *pop. cit.*, hal. 377. Untuk pidato Sukarno, baca: Herbert Feith dan Lance Castles, (ed.), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 62-66.

Antara partai politik dan kelompok kepentingan tidaklah mudah dibedakan. Namun demikian, ada satu perbedaan yang nampaknya umum diterima, yakni jika kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa pada waktu yang sama - berkehendak memperoleh jabatan publik - maka partai politik sebaliknya benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yakni jabatan politik maupun pemerintahan. Kelompok-kelompok kepentingan yang paling kuat, paling besar, dan secara finansial paling mampu adalah kelompok yang berdasar pada bidang pekerjaan atau profesi. Karenanya, sebagian besar negara memiliki serikat buruh, himpunan pengusaha, dan sejenisnya. Walaupun demikian kegiatan kelompok kepentingan dan partai politik sering tumpang tindih. Kelompok kepentingan sering terlibat dalam penyeleksian calon anggota partai dan selalu berusaha agar anggotanya terwakili dalam pemerintahan.⁸¹ Peranan partai politik dan kelompok kepentingan, khususnya pada masa pemerintahan NIT tidaklah begitu kentara, karena baik Dewan Perwakilan Rakyat Sementara maupun kabinet yang sedang memerintah, tidak mendasarkan pemilihannya pada partai tetapi didasarkan pada perwakilan daerah. Rupanya, hal itu mengikuti Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur Bab I Pasal 4, Bab II Pasal 18.⁸² Namun demikian,

⁸¹Almond, *op. cit.*, hal. 50-51

⁸²Sebagai gambaran, lihat: Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 122-124. Lihat juga: Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia ...*, hal. 125, 181. Sedangkan Peraturan Pembentukan NIT dapat dibaca dalam: *Ibid.*, hal. 787-798.

terdapat 37 partai politik dan kelompok kepentingan di Makassar pada saat NIT dibubarkan⁸³ yang nampaknya mereka menyebar dalam fraksi-fraksi yang terdapat pada Dewan Perwakilan Sementara, seperti fraksi progsrif, fraksi pembangunan, dan fraksi nasional.

Memasuki akhir tahun 1950 ketika NIT bubar dan kembali ke negara kesatuan, peranan partai politik mulai nampak kembali menyusul diangkatnya Lapien sebagai Akting Gubernur yang perhatian utamanya ditujukan pada pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di seluruh wilayah propinsi Sulawesi termasuk Makassar.

Karena pada masa pemerintahan NIT telah ada DPRD, maka ketika NIT dibubarkan hanya dilakukan sedikit perubahan, terutama mengganti anggota-anggota yang tidak disukai rakyat. Ketidaksenangan rakyat itu disebabkan oleh sebagian anggota memang hanya ditunjuk oleh pemerintah NIT. Sementara itu, DPRD bersama Dewan Pemerintah Daerah sebagai wadah pemerintahan, juga tempat berkiprah bagi partai politik dan kelompok kepentingan. Pada waktu itu DPRD dipimpin oleh N. Syahadat (Balai Perguruan Sawerigading dan Partai Sarekat Islam) dan DPD dipimpin oleh I. A. Saleh Dg. Tompo (Partai Nasional Indonesia).⁸⁴

⁸³*Ibid.*, hal. 817-822. Dari 37 partai politi dan kelompok kepentingan tersebut, 32 di antaranya berhaluan politik. Sedangkan lima lainnya berhaluan ekonomi, kultural, dan keagamaan.

⁸⁴Harun Kadir, et.al., *op. cit.*, hal. 99.

Kepemimpinan I.A. Saleh Dg. Tompo tidaklah berlangsung lama, karena di tengah persiapan untuk melakukan pemilihan umum guna memilih anggota-anggota DPRD kota Makassar, beliau digantikan oleh H.A. Patoppoi. Penggantian pucuk pimpinan DPD tersebut dilakukan atas keputusan DPRD tanggal 1 Maret 1951 yang timbul dari sebuah mosi yang menyerukan dihapuskannya ikatan daerah Sulawesi Selatan.⁸⁵

Selanjutnya, berdasarkan keputusan Acting Gubernur Sulawesi tertanggal 9 Mei 1951 No. 225 tentang pemilihan anggota DPR Kota Besar Makassar, maka pada tanggal 3 Pebruari 1952 berlangsunglah pemilihan umum secara langsung untuk memperebutkan 25 kursi. Pada pemilu tersebut, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) mengumpulkan suara terbanyak (21,00 %) dengan 7 kursi, menyusul Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) sebanyak 14,04 % dengan 2 kursi, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) sebanyak 8,50 % dengan 2 kursi, Lembaga Indonesia Maluku (L.I.M.) sebanyak 7,82 % dengan 2 kursi. Sedangkan Partai Buruh, Partai Indonesia Raya (Parindra), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Pemuda Demokrat, dan PIR masing-masing hanya mendapat 1 kursi dengan mengumpulkan suara rata-rata 100-180.⁸⁶ Akhirnya dengan melalui berbagai kekecewaan⁸⁷, maka pada tanggal 4 Maret 1952 Gubernur Sudiro

⁸⁵Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 179.

⁸⁶*Ibid.*, hal. 194.

⁸⁷Kekecewaan tersebut antara lain disebabkan oleh kurangnya penduduk kota Makassar yang ikut memilih (hanya 4%

melantik DPRD Kota Besar Makassar dengan ketua St. Muhammad Yusuf Sama (PSII), dan pada bulan April 1952 Dewan Pemerintah Daerah terbentuk pula dengan diketuai oleh Achmad Dara Sahrudin (Masyumi), Ch. Salawati (PKR) sebagai wakil ketua, sedang anggotanya masing-masing M. Noor (Masyumi), Latuperrisa (L.I.M.), Syamsuddin Dg. Mangawing (Partai Buruh).⁸⁸

Sementara itu menurut catatan, pada akhir tahun 1952 jumlah partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan di Makassar sebanyak 17 dan 3 di antaranya adalah partai lokal, yakni Biro Pejuang Pembangun Republik Indonesia (BPPRI), L.I.M., dan Lembaga Indonesia Sulawesi Selatan (L.I.S.S.)⁸⁹

Jika dalam pemilu 1952, Masyumi, PKR, dan PSII berhasil menanamkan pengaruhnya terhadap masyarakat lewat perolehan suaranya yang besar, maka pada pemilihan umum 1955 ternyata Nahdatul Ulama (NU) menempati posisi pertama dengan perolehan suara sebesar 39,30 %, disusul Masyumi (33,98 %), PSII (10,13 %) dan PKR (1,80 %), PNI (1,666 %), PSI (0,32 %), Parkindo (0,25 %), PKI (0,58 %) dan Partai Katolik (0,08 %).⁹⁰

Dari berbagai partai politik yang ada, masing-masing mempunyai basis sosial untuk merebut pengaruh sehingga dapat

dari kira-kira 260.000 penduduk), dan kurang sempurnanya persiapan-persiapan pemilu.

⁸⁸*Ibid.*, hal. 193-197.

⁸⁹*Ibid.*, hal. 515

⁹⁰Perolehan suara selengkapnya, lihat: Barbara Sillars Harvey, *Peristiwa: Pembontakan Setengah Hati* (Jakarta: Grafiti Pers, 1989), hal. 41.

memenangkan suara dalam Pemilu. Organisasi buruh yang memiliki massa cukup besar tidak luput dari incaran partai-partai politik tersebut.

Partai-partai politik yang menggunakan buruh sebagai salah satu basis sosialnya, antara lain: Serikat Buruh Islam Indonesia (S.B.I.I) dari Masyumi, Himpunan Buruh Indonesia (HIMBI) dari PNI, sedangkan Partai Sosialis Indonesia melancarkan pengaruhnya terutama pada organisasi-organisasi buruh yang tergabung dalam Badan Perjuangan Buruh (BPB), Partai Buruh pada organisasi-organisasi anggota Gabungan Organisasi Buruh Indonesia (GOBI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada organisasi-organisasi anggota Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI)⁹¹.

Sebagai konsekuensi berafiliasinya organisasi-organisasi buruh pada partai-partai politik, maka organisasi buruh harus mengikuti dan mengembangkan misi partai. Hal itu sering menimbulkan pertentangan di kalangan serikat buruh. Selain itu, gerakan yang dilakukan terasa kurang mengakar dalam membela kepentingan buruh.⁹² Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Dr. Boentaran ketika menjabat Ketua Dewan Eksekutif Badan Permusyawaratan Buruh Seluruh Indonesia (BPBSI), menurutnya, tiap-tiap partai politik ingin dapat dukungan dari buruh,

⁹¹Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 518.

⁹²Alden Tua S. dan Rekson Silaban, "Perluakah Pluralisme Serikat Buruh?" dalam: *SUARA PEMBARUAN* (Rabu, 14 April 1993), hal. 6.

olehnya itu organisasi-organisasi buruh tidak pernah bebas dari pengaruh kebijaksanaan politik partai, sehingga banyak menimbulkan kesukaran.⁹³ Di samping itu, karena organisasi buruh berafiliasi pada partai politik sehingga kegiatannya sering lebih menitikberatkan pada bidang politik, akibatnya tujuan utamanya untuk memperbaiki nasib buruh terabaikan.

⁹³Sandra, *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia* (Jakarta: Pustaka Rakjat, 1961), hal. 114.

BAB III

ORGANISASI DAN GERAKAN BURUH: REALITAS DI MAKASSAR

A. Berdirinya Organisasi-Organisasi Buruh

Kehadiran organisasi buruh di Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Organisasi perburuhan di Indonesia diperkenalkan dan dipelopori oleh orang-orang Eropa menjelang akhir abad ke-19, yakni pada tahun 1897. Pada tahun tersebut, berdirilah serikat sekerja yang pertama dengan nama *Nederland Indische Onderwyzer Genootschap (N.I.O.G.)*, suatu perserikatan guru-guru Hindia Belanda. Selanjutnya disusul oleh beberapa serikat sekerja dari kantor-kantor dan dinas pemerintah seperti *Posbond (Perserikatan Pegawai Pos) 1905*, *Spoorbond (Perserikatan Pegawai Kereta Api) 1913*, dan lain-lain.¹

Organisasi buruh itu diperuntukkan hanya bagi orang-orang Belanda. Hal ini disebabkan oleh sikap rasialis yang terkenal dengan nama "*Indianisering*"² dan belum adanya pemimpin-pemimpin pada masa itu yang dapat menyalurkan aspirasi kaum buruh dalam satu wadah perjuangan. Itu berarti, antara tahun 1897-1907, kaum buruh Indonesia belum memiliki perserikatan sendiri. Akan tetapi, keadaan itu

¹Sandra, *Menjungkap Dunia Modern. Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia* (Jakarta: Pustaka Rakjat, 1961), hal. 7.

²*Ibid.*, hal. 10-12. *Indianasering* adalah sikap politik Belanda yang membatasi orang-orang Indonesia untuk masuk dalam organisasi buruh yang dibentuk Belanda. Pembatasan tersebut antara lain didasarkan pada persoalan, apakah pegawai bangsa Indonesia yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang sederajat dengan mereka atau tidak.

segera berubah menyusul munculnya kesadaran kebangsaan yang ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo (BO), Sarekat Islam (SI), dan berbagai organisasi lainnya.

Pada tahun 1908, di kalangan para karyawan dan pegawai kereta api partikelir didirikan Vereniging van Spoor-en Tram-Personeel (V.S.T.P.). Anggota dari organisasi ini terdiri atas orang-orang Belanda dan Indonesia. Sesudah tahun itu, segera berdiri organisasi buruh yang anggotanya hanya orang-orang Indonesia, antara lain Perkumpulan Bumiputera Pabean (P.B.P) pada tahun 1911; Persatuan Guru Bantu (P.G.B) tahun 1912; Persatuan Pegawai Pegadaian Bumi-putera (PPPB) tahun 1914; Opium Rogie Bond (O.R.B); dan Perhimpunan Pegawai Pemerintah atau Vereniging van Inlandsch Personeel-Burgerlijk Openbare Werken (VIPBOW) pada tahun 1916.³

Selanjutnya, pada tahun 1917 berdiri organisasi terpenting bernama Personal Fabriek Bond (P.F.B). Organisasi yang dipimpin oleh Surjopranoto dan berkedudukan di Yogyakarta ini dimasuki oleh ratusan pegawai dari hampir seluruh pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur.⁴

³*Ibid.*, hal. 16.

⁴*Ibid.* PFB adalah serikat buruh yang berada di bawah perlindungan Central Sarekat Islam (CSI) dan merupakan "dalang" bagi pemogokan-pemogokan di berbagai pabrik-pabrik gula di keresidenan Jawa Tengah dan Timur. Kajian yang baik tentang masalah ini, baca: Bambang Sulistyio, "Pemogokan

Untuk lebih menguatkan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah, serikat-serikat buruh menyadari pentingnya dijalin kerjasama antar serikat buruh yang satu dengan lainnya. Hal itu telah dikemukakan oleh Sosrokardono, ketua Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) dalam kongresnya pada bulan Mei 1919 di Bandung. Demikian pula dalam kongres S.I. ke-4 pada bulan Oktober 1919 di Surabaya, tuntutan untuk menjalin persatuan di kalangan serikat buruh menjadi agenda yang terpenting.⁵

Sebagai tindak lanjut dari gagasan itu, dibentuklah sebuah panitia yang dinamakan "Panitia Pergerakan Kaum Buruh" dengan tugas mempelajari kebutuhan-kebutuhan pergerakan buruh, maupun cara-cara mempersatukannya. Pada akhir Desember 1919 dilangsungkan rapat pembentukan badan sentral di Yogyakarta yang dihadiri oleh 44 organisasi.⁶ Dari pertemuan tersebut, lahirlah wadah persatuan kaum buruh pertama di Indonesia yang diberi nama Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB). Pengurus PPKB terdiri atas Semaun sebagai ketua, Surjopranoto sebagai

Buruh Pabrik Gula di Jawa Tengah Pada Masa Kolonial 1918-1920" (Yogyakarta: Tesis pada Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1991).

⁵Sandra, *op. cit.*, hal. 20.

⁶Gambang Sulistyono, *op. cit.*, hal. 172. Bandingkan dengan Sandra, *op. cit.*, hal. 21.

wakil ketua, H.A. Salim sebagai penulis, dan Alimin sebagai bendahara.⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, PPKB tidak dapat bertahan lama. Perpecahan yang nampaknya sudah muncul sejak rencana pemberian nama⁸ federasi itu, pada kongres di Semarang tanggal 1 Agustus 1920 semakin hangat. Pokok perselisihan terletak pada paham politik yang di satu pihak beraliran ke-Islam-an dan di pihak lain beraliran komunis. Hal itu dipersoalkan pula dalam kongres SI ke-6 pada bulan Oktober 1921 yang memutuskan untuk membersihkan keanggotaan SI dari penganut aliran politik lain dengan mengadakan "partij discipline"⁹ atau disiplin partai.

Konperensi yang berlangsung pada bulan Juni 1921, berakhir dengan pecahnya PPKB, dan setelah kongres kedudukan PPKB dipindahkan dari Semarang ke Yogyakarta. Sedangkan pihak yang mengundurkan diri membentuk Revolutionare

⁷Agus Sudono, *Sedjarah Kelahiran dan Perkembangan FBSI* (Jakarta: DPP-FBSI, 1979), hal. 9.

⁸Pada mulanya, federasi buruh yang dibentuk itu bernama Revolutionnair Vak Centrale (RVC), tetapi beberapa wakil organisasi seperti Dwijosewoyo (wakil BO) memperingatkan bahwa tujuan revolusioner akan menjadi penghalang bagi badan federasi untuk memperoleh pengakuan badan hukum dari pemerintah. Di samping itu, pemakaian kata revolutionnair berarti melempar kekuasaan, sedang digalang. Lihat: Bambang Sulistyono, *op. cit.*, hal. 175-176. Lihat juga: Sandra, *op. cit.*, hal. 21.

⁹*Ibid.*, hal. 24.

Vakcentrale yang diketuai oleh Semaun.¹⁰

Empat tahun setelah pecahnya PPKB, maka pada tahun 1922 berdiri lagi wadah persatuan buruh Indonesia, yakni Persatuan Vakbond Hindia (P.V.H). Cikal bakal dari P.V.H ini berasal dari koalisi organisasi-organisasi SI, BO, dan Insulinde yang pada tahun 1918 membentuk "Radical Concentratie".¹¹ P.V.H merupakan persatuan yang kedua dan mencapai usia sampai permulaan tahun 1926 (empat tahun).¹²

Untuk ketiga kalinya, pada permulaan Indonesia memasuki kemerdekaan, kaum buruh dipersatukan dalam Barisan Buruh Indonesia (BBI) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 15 September 1945. Namun demikian, dalam kongresnya yang pertama pada tanggal 7 November 1945 perpecahan tidak dapat dihindari. Akhirnya BBI terbagi dalam kelompok yang cenderung kepada politik dan kelompok yang berkeras mempertahankan serikat buruh sebagai gerakan sosial ekonomi.¹³

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, hal. 25-26. Tujuan pokok dibentuknya Radicale Concentratie agar aksi-aksi politis yang dilaksanakan secara bersama dapat lebih mempercepat dilaksanakannya janji pemerintah yang terkenal dengan nama "djandji Nopember". Isi janji tersebut adalah peninjauan kembali ketata-negaraan dan perubahan politik di Indonesia yang diucapkan oleh pemerintah Belanda di Volksraad pada tanggal 18 Nopember 1918.

¹²Agus Sudono, *op. cit.*, hal. 9.

¹³*Ibid.* Dalam kongres pada tanggal 7 Nopember 1945, BBI dilebur menjadi Partai Buruh Indonesia (PBI) yang

Sejak munculnya organisasi buruh yang pertama (1897) sampai pada proklamasi kemerdekaan, semua terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, di luar Pulau Jawa (termasuk Makassar) baru muncul sekitar tahun 1946-1950-an.

Untuk wilayah Sulawesi, pertumbuhan serikat buruh umumnya hanya berpusat di kota Makassar dan Manado. Pada tahun 1948-1951 berbagai macam serikat buruh lahir, baik yang bersifat lokal maupun cabang dari organisasi di Jakarta. Organisasi buruh yang lahir pada waktu itu, antara lain:¹⁴

a. Partai Buruh

PARBI adalah badan pertama-tama yang menghimpun kaum buruh di Makassar. Badan ini dipimpin oleh S. Pijo. Pada kongres pertama Sentral Organisasi Buruh Indonesia (SOBSI) di Malang pada tahun 1947, S. Pijo turut hadir sebagai pengunjung. Anggota badan ini terdiri dari buruh berbagai perusahaan dan sebagian besar buruh harian yang bekerja di Pelabuhan. Di samping PARBI, berdiri pula Organisasi Buruh Proletar Indonesia (OBPI).

berkedudukan di Surabaya. Tetapi sebagian peserta kongres memandang peleburan itu kurang tepat, mengingat bahwa untuk membela dan memperbaiki nasib kaum buruh, yang utama adalah mempersatukan mereka ke dalam ikatan menurut pekerjaan. Dengan demikian, dalam kongres PBI tanggal 13 Desember 1945 di Blitar, diambil keputusan untuk menjelmakan kembali BBI di tengah-tengah masyarakat. Keterangan selanjutnya, baca: Sandra, *op. cit.*, hal. 6.

¹⁴*Ibid.*, hal. 83.

b. Badan Perjuangan Buruh (BPB)

Pada pertengahan tahun 1949 (sic.) berdirilah Badan Penghubung Buruh (BPB) yang beranggotakan 8 serikat sekerja setempat. Pada pendaftaran 1 Januari 1953 badan ini telah beranggotakan 29 serikat sekerja setempat.¹⁵ Nama Badan Penghubung Buruh kemudian berubah menjadi Badan Perjuangan Buruh (BPB). Badan ini juga pernah mengirimkan utusannya untuk mengikuti kongres yang diadakan oleh Badan Pusat Serikat-Serikat Sekerja (BPSS) di Bandung pada bulan Agustus 1949. Dalam kongres tersebut, BPB menjadi salah satu anggota dari federasi yang dibentuk untuk sementara dengan nama Pusat Sementara Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (PSOBSI). Demikian pula dalam Konperensi Himpunan Serikat-Serikat Buruh Indonesia (HISSBI) dan Konperensi Federasi Buruh Indonesia (FBI) pada September 1949, BPB turut mengirimkan utusannya.

c. Gabungan Buruh Pemerintah (GBP)

Organisasi-organisasi buruh tidak hanya dibentuk oleh kalangan buruh di perusahaan atau pelabuhan, tetapi juga di kalangan pegawai pemerintah pada kantor masing-masing. Semboyan mereka adalah "Di dalam berse-rikat manfaat bersama dapat dicapai". Selanjutnya, mengingat kepentingan mereka yang sama sebagai pegawai maka didirikanlah Gabungan Buruh Pemerintah (GBP) yang

¹⁵Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi* (Jakarta: Departemen Penerangan, 1953), hal. 517.

kegiatannya ditujukan pada perbaikan nasib buruh dalam lingkungan kepegawaian.

Setelah penyerahan kedaulatan, organisasi-organisasi buruh di Makassar tumbuh dengan pesat. Sebagian besar organisasi buruh dibentuk di tiap-tiap perusahaan atau tiap-tiap cabang industri. Untuk menghimpun kekuatan buruh, sebagian besar organisasi buruh bergabung dalam satu gabungan atau vakcentrale.

Pada inventarisasi tanggal 1 Januari 1953, jumlah serikat buruh di Makassar tercatat 144 buah yang menghimpun 40163 buruh. Keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam daftar berikut ini:¹⁶

N.U.	Nama vakcentrale	Djumlah organisasi	Didirikan	Anggota		
				Wanita	laki	Djumlah
1.	Badan Perjuangan Buruh (B.P.B.)-Lokaal	29	5/12-'48	1118	10393	11511
2.	Gabungan Organisasi Buruh Indonesia (G.O.B.I.)-Lokaal	30	17/3-'52	218	2891	3109
3.	Sentral Organisasi Buruh Seluruh -Indonesia (S.O.B.S. I.)-Tjabang, berpusat di Djakarta	13	7/10-'51	19	2316	2335
4.	Ikatan Serikat Buruh Import Export-(I.S.B.I.E.)-Lokaal	14	23/4-'50	26	849	875
5.	Badan Permusjawaratan Pegawai Republik Indonesia (BAPPRI)-Lokaal	13	12/8-'51	280	4006	4286

¹⁶Ibid.

Dari daftar tersebut terlihat ada dua vakcentrale (BPB dan GOBI) yang bersaing ketat dalam jumlah anggota organisasi yang bergabung dengannya. Pada 1 Januari 1953 terdapat 29 organisasi yang bergabung dengan BPB, sedangkan dalam GOBI sebanyak 30 organisasi. Akan tetapi, pada bulan Desember 1953 anggota BPB bertambah satu lagi sehingga jumlahnya sama dengan GOBI.¹⁷ Namun demikian, dalam hal jumlah anggota, tidak ada yang dapat menyaingi BPB yang pada Desember 1953, buruh yang bergabung didalamnya telah mencapai lebih kurang 30.000 orang¹⁸ sedangkan vakcentrale lain hanya berkisar antara 800-4000-an.

Keberhasilan BPB dalam mengumpulkan anggota yang tidak tertandingi oleh vakcentrale lain adalah disebabkan kesuksesannya dalam memimpin pemogokan, sehingga buruh dan organisasi-organisasinya berbondong-bondong untuk bergabung dengan BPB.¹⁹ Akan tetapi, selain organisasi-organisasi buruh yang tergabung dalam berbagai vakcentrale tersebut, terdapat 45 organisasi yang berdiri sendiri (baca: tidak bergabung dalam suatu vakcentral) dan menghimpun 18047 buruh yang terdiri atas 798 wanita dan 1729 laki-laki.²⁰

¹⁷Keterangan tentang jumlah terakhir anggota organisasi yang tergabung dalam BPB ini diungkapkan oleh Ketua Umum BPB (Haneng) dalam kata sambutannya sehubungan dengan diterbitkannya Buletin "Suara BPB". Lihat: *Buletin Suara BPB* (15 Desember 1953), hal. 2.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 513.

²⁰*Ibid.*

B. Kaum Buruh: Antara Solidaritas dan Kepentingan Organisasi

... perjuangan kaum buruh tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi adalah meliputi seluruh dunia yang bersipat Internasional. ... dalam organisasi Buruh ada mempunyai Bendera dan lagu sendiri, yang seluruh Buruh di Dunia mengangkat dan mendengarkan pada hari 1 Mei ialah hari peringatan Buruh...²¹

Petikan di atas adalah pernyataan solidaritas dari sejumlah organisasi buruh yang mengadakan rapat pada hari Minggu, 2 Oktober 1949 di Gedung Teater Alhambra yang dihadiri oleh lebih kurang 300 orang, di antaranya 50 orang wanita.

Dalam gerakan buruh di Makassar, dinamika antara solidaritas buruh di satu pihak dan kepentingan organisasi di lain pihak tampak jelas. Kedua persoalan tersebut saling berakumulasi, sehingga kadang-kadang melahirkan "intrik" antar organisasi, bahkan antar individu atau pengurus.

Beberapa kasus di Makassar memperlihatkan, bahwa solidaritas buruh sering muncul akibat tindakan sewenang-wenang pihak majikan (pengusaha) terhadap buruh. Solidaritas buruh itu sering muncul dalam bentuk pernyataan bersama

²¹Arsip: Arnas Perw. Sul-Sel. Arsip Pemerintah NIT 1946-1950. Reg. 129 a. Pernyataan yang disampaikan pada rapat umum tersebut dihadiri oleh 17 organisasi ditambah wakil dari pemerintah dan pengusaha.



atau mosi²² kepada pengusaha atau pemerintah tanpa melihat dari serikat mana seorang buruh yang "teraniyaya" berada. Sedang persoalan kepentingan organisasi muncul dalam bentuk konflik antar pengurus yang disebabkan oleh adanya keinginan untuk memindahkan induk organisasi yang dipimpinnya.²³

²² Seperti ketika terjadi devaluasi yang mengakibatkan harga barang-barang semakin meningkat sedangkan upah tetap, maka sejumlah organisasi buruh dan organisasi lainnya mengadakan rapat umum pada tanggal 2 Oktober 1949. Dalam rapat tersebut dikeluarkan sebuah mosi kepada pemerintah agar mencegah kenaikan harga barang-barang dan kepada kaum buruh agar untuk sementara waktu tidak membeli barang-barang yang mahal sebelum harga sama di waktu sebelum devaluasi. Laporan selengkapnya, baca: *Ibid.* Selanjutnya, pada tanggal 22-23 Januari 1950 diadakan rapat untuk membicarakan perihal dipecatnya salah seorang mandor, karena dituduh terlibat dalam menghasut pemogokan. Dalam rapat tersebut dikeluarkan mosi agar mandor yang dipecat itu dipekerjakan kembali. Untuk lebih jelasnya, lihat bab ini, hal. 71-72. Selain itu, sebagai wujud rasa solidaritas buruh, maka setiap tanggal 1 Mei, kaum buruh berkumpul di lapangan Karebosi untuk mengadakan upacara peringatan hari buruh. H. Haneng, wawancara pada tanggal 30 Maret 1994 di Ujungpandang.

²³ Sebagai contoh, pada tanggal 6 Desember 1953, Sahibu selaku ketua SBPI mengeluarkan edaran kepada anggota yang menyatakan keluar dari BPB dan masuk dalam GOBI, tetap tindakan Sahibu ini dinilai sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Sehingga pada tanggal 9 Desember 1953, pengurus lainnya (M. Kaloli dan Poli) mengeluarkan edaran bantahan bahwa SBPI bukanlah Sahibu dan sebaliknya, dan SBPI belum pernah memutuskan keluar dari BPB. Dengan tindakan Sahibu tersebut, dia dipecat dari SBPI dan pemilihan pengurus baru segera dilakukan. Dalam pemilihan yang diikuti oleh kurang lebih 300 orang buruh tersebut M. Kaloli bersama Poli terpilih masing-masing sebagai ketua dan sekretaris. Dengan demikian, SBPI tetap bergabung dengan BPB. Lihat: "Serikat Buruh Pelajar Indonesia Tetap di BPB" dalam: Buletin Suara BPB (15 Nopember 1953), hal. 8.

Timbulnya konflik kepentingan dalam organisasi buruh dimungkinkan oleh banyaknya organisasi buruh yang berafiliasi dengan partai politik di samping adanya ideologi tertentu yang menjadi landasan sekaligus menjadi tujuan gerakannya.²⁴ Akan tetapi, seperti yang juga diinginkan oleh Marx, bahwa kaum buruh harus memahami perserikatan sebagai sesuatu yang lebih penting daripada sarana untuk memperjuangkan perbaikan nasib²⁵, tampaknya masih sulit terlaksana. Hal ini disebabkan oleh tujuan gerakan masih berputar-putar pada persoalan "perut" di samping persoalan politik praktis, serta masih kurangnya pengetahuan buruh dalam berbagai hal.²⁶

Untuk persoalan yang terakhir di atas, beberapa organisasi buruh telah berusaha mengatasinya dengan mengadakan pendidikan bagi anggotanya, seperti yang terlihat berikut ini:²⁷

²⁴Sebagian besar serikat buruh di Makassar beraliran Sosialis, di samping ada yang hanya bertujuan perbaikan nasib. Baca: Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 517. Persoalan ideologi yang dianut oleh setiap serikat buruh di Makassar masih perlu pelacakan yang lebih serius, mengingat terbatasnya data tentang hal itu.

²⁵Roos Poole, *Moralitas dan Modernitas Di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hal. 205-206.

²⁶H. Haneng, wawancara pada tanggal 26 Maret 1994 di Ujungpandang.

²⁷Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 518.

- a. S.B. Pertjetakan Indonesia Tjb. Makassar membuka seminggu dua kali "Pendidikan Buruh" untuk anggota-anggotanya dan untuk mereka jang menaruh minat. Jang dikursuskan:
1. Perdjoangan Buruh,
 2. Social-Ekonomi.
- b. I.S.B.I.E. (Ikatan Serikat Buruh Emport dan Export) mengadakan seminggu sekali, dengan mata peladjaran sbb.:
1. Tata Negara,
 2. Sociologie,
 3. Perburuhan.
- c. O.B.P.I. (Organisasi Buruh Proletar Indonesia) mengusahakan "kader kursus" 2 kali seminggu, diberikan peldajaran sbb.:
1. Tata Negara,
 2. Politik Ekonomie,
 3. Gerakan Buruh,
 4. Sociologie.
- d. B.P.B. (Badan Perdjoangan Buruh) mengadakan seminggu 5 kali. Mata peladjarannja jaitu:
1. Gerakan Buruh,
 2. Organisasi/Administrasi,
 3. Koperasi,
 4. Tata Negara,
 5. Ilmu Masjarakat,
 6. Ekonomie,
 7. Jurnalistiek,
 8. Bahasa Inggeris.

Selanjutnya, untuk menjalin komunikasi di antara sesama anggota maka organisasi-organisasi buruh tertentu mengadakan penerbitan, seperti SBPI dengan "Typografia" setiap dua kali sebulan²⁸, dan BPB dengan Buletin "Suara BPB". Walaupun

²⁸ *Ibid.*

BPB"²⁹ Walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana (stensilan), penerbitan ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi anggotanya, khususnya untuk mengetahui perkembangan organisasi dan berita-berita perburuhan lainnya.

²⁹Arsip: Arnas Perw. Sul-Sel. Arsip Pribadi H.A.R. Tamma. Reg. 543. "Suara BPB" adalah pengganti "Suara Buruh" yang pernah diterbitkan sebelumnya, tetapi diberhentikan karena kesulitan-kesulitan dalam pengelolaannya. Lihat: *Buletin Suara BPB* (15 Desember 1953), hal. 2.

C. Beberapa Aksi Gerakan Buruh

1. Gerakan Sebelum Negara Indonesia Timur Bubar

Organisasi-organisasi buruh di Makassar lahir di tengah suasana pergolakan politik yang menuntut dibubarkannya NIT. Dalam menanggapi aksi tersebut, kaum buruh di Makassar tidak tinggal diam. Berbagai macam gerakan, seperti pemogokan, pemasangan pamflet, anti-overwerk, dan teror turut dilancarkan.

Dari berbagai macam bentuk gerakan tersebut, pemogokan merupakan hal yang paling sering dilancarkan. Hal ini dapat dimengerti, mengingat pemogokan memiliki kekuatan yang memaksa dibanding dengan gerakan-gerakan lainnya.

Pemogokan yang dilakukan disamping bertujuan untuk perbaikan nasib atau kenaikan upah juga mempunyai tujuan politis, yakni ingin membubarkan NIT dengan jalan melumpuhkan pusat-pusat perekonomian Belanda yang juga merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah NIT. Pemogokan tersebut dipusatkan di pelabuhan, karena di situlah tempat beroperasinya kapal-kapal Belanda yang bernaung di bawah perusahaan-perusahaan pelayaran besar seperti Koninklijk Paketvaart Maatschappij (KPM).³⁰ Kapal-kapal yang beroperasi

³⁰Berdasarkan kontrak pelayaran niaga antara pemerintah Hindia Belanda dan Kementerian Negeri Jajahan pada tanggal 5 Juli 1888 dan surat keputusan pemerintah Belanda pada 15 Juli yang memberikan hak kedudukan sebagai angkutan negara, perusahaan yang kelak menjalankan pelayaran berdasarkan keputusan itu adalah perusahaan pelayaran yang bernama KPM - pada 4 September 1888. Tujuan

di bawah perusahaan tersebut merupakan pemasok berbagai macam senjata untuk keperluan tentara Belanda dan NIT, di samping untuk mengangkut barang-barang dagangan seperti rotan dan kopra yang pada waktu itu merupakan mata dagangan primadona. Jadi, tuntutan perbaikan nasib atau kenaikan upah tidak dapat dipisahkan dari tuntutan yang bersifat politik, yakni membebaskan bangsa Indonesia (khususnya Makassar) dari pengaruh dan tekanan pihak Belanda.³¹ Dengan demikian, dapatlah dipahami jika pada suatu pemogokan, buruh menuntut kenaikan upah sampai 300%³² yang di mata perusahaan adalah tidak masuk akal.

Pemogokan dan gerakan buruh lainnya yang dipaparkan dalam tulisan ini lebih banyak dipelopori oleh Badan Perdjjuangan Buruh (BPB) yang anggotanya terdiri atas buruh-buruh pelabuhan (anggota langsung) dan serikat-serikat buruh (anggota tidak langsung) seperti Serikat Buruh Pelayan

pendirian KPM dinyatakan "untuk menunjukkan kekuatan dan ketegasan kekuasaan Belanda di kepulauan Hindia Belanda dan perluasan dan penguatan kegiatan perdagangan di antara pelabuhan-pelabuhan Hindia Belanda dan dengan negara Induk (Belanda) dan semua bagian dunia lainnya". Keterangan selengkapnya, baca: Edward L. Poelinggomang, *Proteksi dan Perdagangan Bebas. Kajian Tentang Perdagangan Makassar pada Abad ke-19* (Amsterdam: Disertasi pada Vrije Universiteit, 1991), hal. 131-138.

³¹H. Haneng, wawancara pada tanggal 26 Maret 1994 di Ujungpandang.

³²Lihat: "Pemogokan di Pelabuhan" dalam: *DINIHARI* (Sabtu, 21 Januari 1950).

Indonesia (SBPI)³³, Serikat Buruh Percetakan Indonesia (SBPI)³⁴, dan lain-lain.

Pemogokan pertama terjadi pada tahun 1949 di pelabuhan Makassar yang berlangsung selama 15 hari. Pemogokan yang dipimpin langsung oleh ketua BPB (H.Haneng) diikuti lebih kurang 10.000 buruh. Pemogokan tersebut menuntut kenaikan upah dari 75 sen menjadi Rp 10. Tuntutan itu hanya dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan sebesar Rp 5, akan tetapi buruh tetap bersikeras dengan tuntutan yang semula sehingga terjadi *deadlock* (jalan buntu). Haneng yang nampaknya telah memiliki pengetahuan tentang bentuk-bentuk pemogokan³⁵ yang didapatnya dari Australia, dalam pemogokan pertama itu menerapkan sistem *walkout*, yakni meninggalkan tempat kerja, tetapi tetap berkumpul di luar pelabuhan. Akibatnya, kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan menjadi macet, karena pihak perusahaan tidak dapat mendatangkan buruh lain karena dihalangi oleh buruh yang sedang mogok. Akhirnya, pemerintah NIT turun tangan yang dalam hal

³³Keterangan tentang serikat buruh ini, baca: "Serikat Buruh Pelajan Indonesia Tetap di BPB" dalam: *Buletin Suara BPB* (15 Nopember 1953), hal.7-8.

³⁴Keputusan SBPI untuk masuk dalam BPB, diambil dalam rapat anggota SBPI pada tanggal 27 Desember 1950. Lihat: Arsip: Arnas Perw. Sul-Sel. Reg. 221.

³⁵Bentuk-bentuk pemogokan adalah *walkout*, yakni pekerja pulang atau meninggalkan tempat kerjanya; *sit-down strike*, adalah para pemogok tidak pulang, tetapi mereka hanya duduk bergerombol dan tidak melakukan pekerjaan rutin; *sympathy*

diwakili oleh S. Binol³⁶. Setelah diadakan perundingan antara perusahaan, buruh, dan pemerintah dicapailah kesepakatan untuk menaikkan upah buruh dari 75 cen menjadi 3 ringgit (Rp. 7,5), dan selama pemogokan buruh dibayar sebesar 1 ringgit (Rp 2,5).³⁷

Pemogokan tersebut dilaporkan oleh reserse Kota Makassar kepada Tuan Inspecteur van Politie kelas II yang sedang melakukan perjalanan ke pelabuhan kapal Welhelmina dan Juliana pada tanggal 13 Oktober 1949. Dalam kunjungan tersebut, Saraka, Adj. Hoofd Rechercheur menemukan penyebab mogoknya buruh, seperti pekerja-pekerja biasa bekerja lebih daripada waktunya, kadang-kadang sampai pukul 19 malam, padahal tidak mendapat uang kelebihan jam.³⁸

strike, yakni misalnya apabila para buruh di sebuah perusahaan sedang melakukan pemogokan, maka serikat pekerja sopir truk turut bersimpati dan menolak mengantarkan semua pesanan yang diminta perusahaan bersangkutan sampai perusahaan mengabulkan tuntutan buruh yang sedang mogok itu. Lihat: Mathoes Nalle, "Pemogokan dan Penangkalannya" dalam: *SUARA PEMBARUAN* (Selasa, 22 Februari 1994). Uraian yang lengkap tentang pengertian, klasifikasi, maupun dampak pemogokan dalam perekonomian, dapat dibaca dalam: David L. Sills (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences, Volume 8* (New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1972), hal. 500-506.

³⁶S. Binol adalah menteri sosial pada Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung Kedua, 12 Januari - 27 Desember 1949.

³⁷H. Haneng, wawancara pada tanggal 26 Maret 1994 di Ujungpandang, tanggal 26 Maret 1994.

³⁸Arsip: Arnas Perw. Sul-Sel. Arsip Pemerintahan Indonesia Timur 1946-1950. Rehg. 153.

Pemogokan yang kedua terjadi pada bulan Januari 1950, yang dilakukan oleh buruh-buruh pelabuhan Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN). Dalam pemogokan itu, buruh menuntut agar upah kelebihan kerja (*overwerk*) yang besarnya f. 0,50 sejam dinaikkan menjadi 300%.³⁹

Pemogokan itu menyebabkan dipecatnya mandor Lewa karena dituduh turut mendalangi pemogokan tersebut. Akibatnya pada tanggal 22 Januari 1950 bertempat di gedung Persatuan Pemuda Tionghoa seberang lautan jalan Mardekaya No. 23 A diadakan suatu rapat yang dihadiri oleh kira-kira 100 orang yang mewakili 20 organisasi buruh dengan dipimpin oleh S. Rompas. Dalam rapat itu dikeluarkan sebuah mosi yang mengecam tindakan Mr. Moorman (pegawai tinggi pada *Arbeids inpeksi* pada kementerian urusan sosial NIT) yang dalam perundingannya dengan delegasi buruh bersama pimpinan SMN ternyata memihak kepada SMN sehingga perundingan gagal. Mosi tersebut juga mendesak pemerintah agar Mr. Moorman dipindahkan ke tempat lain dan mandor Lewa yang jelas tidak bersalah dikembalikan lagi pada pekerjaannya yang semula.⁴⁰

³⁹Lihat: "Pemogokan di Pelabuhan" dalam: *DINIHARI* (Sabtu, 21 Januari 1950).

⁴⁰Arsip: Arnas Perw. Sul-Sel. Arsip Pemerintahan Indonesia Timur 1946-1950. Reg. 126. Lihat juga: "Mosi BPB" dalam: *DINIHARI* (Kamis, 26 Januari 1950). Perihal pemecatan seorang mandor karena dituduh mendalangi suatu pemogokan, seringkali terjadi. Selain mandor Lewa yang bekerja di SMN, mandor Badau yang bekerja di Pabrik Es Aurora juga dipecat dengan tuduhan yang sama. H. Haneng, wawancara pada tanggal 30 Maret 1994 di Ujungpandang.

Dari mosi yang diajukan tidak ditemukan keterangan apakah tuntutan tersebut dipenuhi atau tidak. Tetapi dalam surat kabar yang sama (baca: Harian DINIHARI) yang terbit pada tanggal 26 Januari 1950 diberitakan bahwa pekerja-pekerja SMN yang pernah mogok telah bekerja kembali.⁴¹

Pemogokan yang dilakukan oleh buruh SMN tersebut juga mendapat perhatian serius di kalangan pers. Hal itu terbukti dengan diangkatnya masalah ini dalam tajuk rencana surat kabar harian DINIHARI dengan judul "Siapa Bilang Djembel Tak Bersatu..!"⁴²

Sehari sebelum terbitnya pemberitaan bahwa buruh SMN telah bekerja kembali, pada tanggal 25 Januari 1950 pagi ditemukan selebar pamflet oleh Agen Polisi Langkoke. Pamflet yang dilekatkan pada tembok kantor pos di jalan Gouverneurslaan (sekarang jalan Balai Kota) berbunyi sebagai berikut:

⁴¹Baca: "Pekerdja2 SMN Bekerdja Kembali" dalam: *DINIHARI* (Kamis, 26 Januari 1950).

⁴²Lihat: "Siapa Bilang Djembel Tak Bersatu..!" dalam: *DINIHARI* (Senin, 23 Januari 1950). Tajuk rencana tersebut antara lain berbunyi: Mereka (kaum buruh, pen.) tidak selamanya tinggal buta mata, buta telinga dan buta perasaan, tetapi dari hari kehari mereka tahu akan harga dirinya jang berhak hidup sentosa. Oleh sebab itu kita harus bidjaksana dalam tindakan menghadapi mereka,. Kalau dulunya mereka ini dapat dibuat perkakas dan sebagai tangga untuk mentjapai sesuatu maksud untuk kepentingan diri sendiri, maka sekarang ini djangan hendak ditjoba2 lagi.

MERDEKA !!!!
 KAUM BURUH SELURUHNJA!!!
 BERSATULAH ENKKAU SEMUANJA
 KINI TELAH DATANG WAKTUMU
 UNTUK MEMPERBAIKI NASIBMU
 HARGAILAH TENAGAMU
 UNTUK NUSA DAN BANGSAMU
 DJANGAN SEGAN MENUNTUT
 HAK MILIKMU
 NEGARA INDONESIA MERDEKA
 TEMPAT BURUH HIDUP BEKERDJA
 BURUH SELURUHNJA BILA BERSATU
 PASTI PENDJADJAHAN RUNTUH
 BILA HIDUPMU AKAN TERDESAK
MOGOKLAH
 ENKKAU DENGAN SERENTAK
 PUTRA MERDEKA⁴³

Pamflet serupa juga ditemukan pada papan reklame di
 depan kantor "Drukkery Makassar" di Hogepad No. 15. Demikian
 pula di Pasar Butung dan Pasar Kampung Baru terdapat pamflet
 dengan bunyi yang sama. Bahkan di tempat itu disertai
 selemba poster yang menggambarkan seseorang dengan satu
 tangannya memegang pedang dan tangan yang lainnya memegang
 bendera merah-putih serta di sampingnya tertulis "BASMILAH
 SIFAT PENDJADJAHAN". Sedangkan pada papan reklame di pasar
 Kampung Baru, setelah poster tersebut juga terdapat poster
 yang menggambarkan P.J.M. Presiden NIT sedang memegang
 seseorang yang memakai songko (kopiiah) dan di sampingnya
 tertulis "SUKAWATI INGIN NAIK KUDA, TETAPI RAKJAT JANG
 MENDERITA"⁴⁴

⁴³Arsip: Arnas Perw. Sul-Sel. Arsip Pemerintahan
 Indonesia Timur 1946-1950. Reg. 153.

⁴⁴Ibid.

Dalam Pamflet dan poster di atas, tidak terdapat keterangan siapa yang membuat dan menempelkannya. Namun demikian, dari isinya dapat diketahui kalau hal itu tentunya dibuat dan ditempel oleh orang atau organisasi yang bergerak dalam bidang perburuhan.

Selanjutnya, pada tanggal 29 Januari 1950, terjadi lagi pemogokan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai pelelangan ikan. Pemogokan itu menyebabkan penjualan ikan tidak berjalan sebagaimana biasanya. Buruh yang mogok menuntut perbaikan nasib atau kenaikan upah yang telah dijanjikan oleh pihak Kotapraja Haminte sejak Oktober 1949. Sampai diturunkannya berita ini pada hari Senin, 30 Januari 1950 pemogokan masih tetap berlangsung.⁴⁵

Sebelum terjadi pemogokan, mereka telah mendesak kepala pegawai yang langsung menghadap sekretaris wali kota dan mengajukan permohonan para pegawai itu. Dari pihak Haminte diperoleh jawaban bahwa masalah tersebut sementara diurus karena perhitungan anggaran belanja belum selesai. Namun demikian, akibat sudah terlalu lamanya mereka bersabar menunggu sementara tuntutan hidup semakin mendesak maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah melakukan pemogokan.

Pada mulanya, pelelangan ikan yang didirikan oleh

⁴⁵Lihat: "pegawai Pelelangan Ikan Mogok" dalam: *DINIHARI* (Senin, 30 Januari 1950).

Persatuan Nelayan Indonesia (PERNI) pada tanggal 10 Oktober 1946 dan diserahkan pada tanggal 10 Oktober 1949 kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar itu semuanya berjalan seperti biasa. Akan Tetapi lama kelamaan pelanggaran-pelanggaran kecil mulai terjadi disusul dengan pelanggaran yang terang-terangan. Pembeli-pembeli ikan yang tidak membayar tunai memuncak, di samping banyak yang melarikan ikan dan selanjutnya tidak muncul kembali. Hal-hal itulah yang turut memicu terjadinya pemogokan. Tambahan pula, di samping hanya mendapat gaji yang rendah, pegawai-pegawai pelelangan ikan juga mendapat kesulitan seperti gangguan keamanan yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan nelayan-nelayan yang hendak menerima harga ikannya dengan cepat.⁴⁶

Enam hari setelah terjadinya pemogokan di pelelangan ikan, pada tanggal 6 Pebruari 1950 dimulai lagi suatu pemogokan yang berlangsung selama sembilan hari. Pemogokan yang diorganisir oleh Badan Perjuangan Buruh (BPB) itu diikuti oleh lebih kurang 20.000 orang buruh. Seperti halnya pada pemogokan sebelumnya, pemogokan itupun menuntut perbaikan upah yang ternyata dipenuhi oleh pihak perusahaan. Dengan demikian, gaji harian sebelum pemogokan yang hanya Rp 1,50 berubah menjadi Rp 6 setelah terjadinya pemogokan.⁴⁷

⁴⁶Sikado Dg. Nai, et.al., *Kenangan 50 Tahun Berotonomi Daerah Kota Makassar* (Makassar?: t.p./, 1957?), hal. 112-114.

⁴⁷Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 513.

Pemogokan yang dimotori oleh BPB tersebut, menggunakan sistem "Slowdown". Pemogokan dilakukan dengan memanfaatkan derek kapal. Derek kapal yang biasanya memuat 20 karung kopra, pada saat pemogokan itu hanya diisi satu karung yang setelah diangkat tidak diturunkan di palka, tetapi dibiarkan tergantung-gantung.⁴⁸ Akibatnya, tidak ada jalan lain yang harus ditempuh oleh pihak perusahaan, kecuali harus memenuhi tuntutan buruh tersebut, karena kalau tidak kopra dan barang-barang lainnya akan bertumpuk.

Bentuk pemogokan ini nampaknya merupakan ciptaan dari BPB sendiri, karena sepanjang pengetahuan penulis, bentuk pemogokan semacam ini tidak pernah dilakukan oleh serikat buruh yang lain, baik di Makassar maupun di Indonesia umumnya.

Selanjutnya kira-kira sebulan setelah terjadinya pemogokan di atas, pada bulan Maret (5 Maret 1950?)⁴⁹ terjadi lagi pemogokan di pelabuhan. Hal itu diketahui dari surat kawat yang dikirim oleh Assisten-Residen E. Haug kepada walikota yang meminta laporan tentang besarnya pemogokan, sebab-sebab pemogokan, dan tindakan-tindakan yang telah

⁴⁸H. Haneng, wawancara pada tanggal 26 Maret 1994 di Ujungpandang.

⁴⁹Arsip: Arnas Perw. Sul-Sel. Arsip Pemerintahan Indonesia Timur 1946-1950. Reg. 152. Dalam surat kawat yang dikirim oleh E. Haug kepada Perdana Menteri NIT tertanggal 11 Maret 1950 diberitakan, bahwa pemogokan tersebut sudah berlangsung selama 6 hari yang lalu. Jadi besar kemungkinan pemogokan tersebut berlangsung pada tanggal 5 Maret 1950.

diambil untuk mencegah timbulnya kekacauan akibat pemogokan tersebut.

Dari serangkaian gerakan buruh tersebut di atas, nampaknya buruh menggunakannya sebagai "*bargaining weapon*" atau senjata tawar-menawar dalam memenuhi tuntutan. Selain itu, tuntutan perbaikan nasib atau kenaikan upah tampaknya dominan dalam setiap pemogokan. Hal itu dapat dimengerti mengingat upah yang mereka terima tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, selain bekerja sebagai buruh, mereka masih harus mencari uang untuk belanja serta untuk membeli pakaian dan juga untuk pembayaran pajak. Bahkan kadang-kadang untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi, para buruh tidak jarang pindah tempat kerja. Mereka lebih senang bekerja pada orang Tionghoa atau perusahaan-perusahaan lainnya yang lebih menjamin kehidupannya, terlebih bagi mereka yang telah berumah tangga dan membutuhkan biaya hidup lebih besar bagi anak dan istrinya. Sebagai contoh, kalau semula mereka bekerja pada KPM dengan upah f. 1.50 sehari dan perusahaan lain terbuka dengan upah f.3 maka mereka akan meninggalkan pekerjaannya yang pertama.⁵⁰

⁵⁰Arsip: Arnas Perw. Sul-Sel. Arsip Pemerintahan Indonesia Timur 1946-1950. Reg. 152.

2. Gerakan Setelah Negara Indonesia Timur Bubar

Dengan dibubarkannya NIT pada tanggal 15 Agustus 1950, yang "kematianannya" juga turut diperjuangkan oleh kaum buruh (dengan caranya sendiri) maka pemogokan-pemogokan dalam skala yang besar tidak seramai sebelum NIT bubar.

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa dengan kembalinya Indonesia ke negara kesatuan tidaklah berarti bahwa pengaruh Belanda bersama perusahaannya (terutama perusahaan pelayaran) turut hilang, karena baru pada akhir tahun 1957 pemerintah Indonesia melakukan penyitaan terhadap perusahaan pelayaran KPM dan perusahaan-perusahaan lainnya. Hal itu berarti, persoalan-persoalan antara buruh dengan perusahaan (milik Belanda) belum berhenti.

✓ Persoalan yang segera muncul setelah Indonesia kembali ke negara kesatuan adalah menyangkut tempat makan buruh-buruh pelabuhan dan tidak disediakannya air minum bagi buruh. Persoalan tersebut terjadi antara pihak buruh dan majikan Scheepvaart Vereniging (Perkumpulan Perkapalan). Harian Nasional dan Merdeka NUSANTARA melaporkan, bahwa karena meluasnya keadaan itu sedemikian rupa, maka pihak BPB telah menyurat kepada pihak majikan dengan instansi militer dan kepolisian di kota ini. Diterangkan bahwa pada jam makan siang di sekitar jalan pelabuhan itu, lalu lintas terhalang oleh buruh-buruh yang menjadikannya sebagai tempat makan. Kondisi itu pernah mengakibatkan seorang buruh yang sedang makan diserempet mobil dan juga pernah tengah asyik

diserempet mobil dan juga pernah tengah asyik makan lalu diusir oleh tuan-tuan yang punya toko. Di samping itu, buruh tidak disediakan air minum, sehingga sering timbul percekocokan dalam atas kapal, karena buruh-buruh darat naik minum ke kapal. Persoalan itu berkali-kali dibicarakan dengan perusahaan baik secara lisan maupun tulisan tetapi tidak diperhatikan yang diberikan.⁵¹

Sementara itu, jumlah perselisihan perburuhan yang tercatat selama tahun 1952 adalah 206 dengan jumlah pemogokan 9 kali dan diikuti oleh 4172 buruh yang mogok. Persoalan yang menjadi sumber perselisihan antara lain permintaan kenaikan upah, pemberhentian hadiah lebaran, dan jaminan sosial.⁵² Namun demikian, penulis tidak menemukan data yang rinci tentang gerakan buruh yang terjadi sepanjang tahun 1952 sampai awal tahun 1954.

Disamping melakukan aksi pemogokan, buruh juga melakukan aksi yang dinamakan "anti-overwerk". Aksi itu merupakan tindakan balasan atas pemotongan upah yang dilakukan KPM untuk semua jam-jam pemogokan dari buruhnya.

⁵¹Untuk keterangan selengkapnya, baca: "Dimana Tempat Buruh Makan? Di djalan raja dan dimuka toko" dalam: *DINIHARI* (Senin, 29 Oktober 1951).

⁵²Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hal. 519. Pemogokan-pemogokan berlangsung dalam sakal kecil dan banyak dilakukan oleh serikat-serikat buruh setempat, seperti serikat buruh di PPSS, Perusahaan Minyak, dan lain-lain. H. Haneng, wawancara pada tanggal 30 Maret 1994, di Ujungpandang.

Jadi, selama KPM belum membayar upah buruh yang telah dipotongnya berhubung adanya aksi mogok dari buruh, maka selama itu pula buruh akan melakukan aksi "anti-overwerk" yang menurut Haneng (Ketua BPB) sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951.⁵³ Sedangkan untuk uang lembur, telah dicapai persetujuan yang sementara waktu tetap memegang peraturan lama, yakni Rp 2.50 bagi buruh biasa dalam sejam dan Rp 3.50 bagi mandor. Kesepakatan itu tidak berlaku bagi KPM, karena persoalan sebelumnya tentang pemotongan upah buruh karena mogok belum tuntas. Dan pada pertengahan Maret 1954, delegasi Front Kesatuan Aksi Buruh Pelabuhan (FKABP) akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan perundingan dengan VWHI pusat tentang pensiun, gaji pokok, pengobatan dan perawatan buruh, gratifikasi tahunan dan hadiah lebaran.⁵⁴

⁵³Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951 yang dikeluarkan pada bulan September 1951 mengatur tentang tata cara penyelesaian perburuhan. Undang-Undang tersebut merupakan pengganti Peraturan Kekuasaan Militer No. 1 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Pertikaian Perburuhan. Lihat: Syamsul Bachri, "Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Buruh: Suatu Telaah Sosio-Yuridis Tentang Penyelesaian Kasus Perburuhan di Kodya Surabaya" (Surabaya: Tesis pada Fakultas Pasca Sarjana Unair, 1989).

⁵⁴Lihat: "Persetujuan FKAB dan VWHI Mengenai Uang Lembur dan Perundingan dgn VWHI Pusat" dalam: Harian TINJAUAN (Selasa, 2 Maret 1954).

Selanjutnya menjelang dilangsungkannya pemilu 1955, tepatnya 8 Agustus 1955 buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Percetakan Indonesia (SBPI) yang merupakan salah satu anggota BPB merencanakan untuk melakukan aksi SIT-DOWN STRIKE (duduk-tidak kerja/mogok) selama satu minggu yang setiap harinya dilakukan dua jam, yakni aksi pada pagi hari dimulai dari pukul 11 sampai 12 dan pada siang harinya dimulai dari pukul 2 sampai pukul 3. Untuk menghindari persepsi yang salah terhadap aksi ini, maka A.B. Dg. Nai (Komando Aksi SBPI) dalam siaran yang dikeluarkannya menjelaskan bahwa aksi yang direncanakan itu sesuai dengan prosedur Undang-Undang Darurat No. 16/1951 dan pencatatan untuk beraksi yang telah diajukan oleh SBPI pada instansi perburuhan pada tanggal 16 Juli 1955. Aksi ini merupakan reaksi atas gagalnya perundingan menyangkut tuntutan SBPI yang diajukan pada tanggal 8 Maret 1955 dengan pihak pengusaha, jawatan hubungan perburuhan, dan Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah (PAD). Adapun tuntutan SBPI kepada majikan percetakan Makassar NV terdiri dari 5 pasal yang antara lain adalah belum ada ketepatan tentang soal jaminan hari tua buruh percetakan yang dianggap sangat prinsipil bagi buruh.⁵⁵

⁵⁵Laporan selengkapnya, baca: "8 Agustus Buruh Pertjetakan Makassar adakan aksi Sitdown" dalam: Harian TINJAUAN (Sabtu, 6 Agustus 1955).

Selain menggunakan aksi mogok, pemasangan pamflet, dan anti overwerk sebagai cara untuk melumpuhkan pusat-pusat ekonomi Belanda, buruh melakukan juga teror. Teror dilakukan untuk menakut-nakuti orang-orang Belanda dengan cara memukul atau mengeroyok mereka. Aksi ini tidak hanya dilakukan di pelabuhan, tetapi juga meluas ke perusahaan-perusahaan lain seperti Perusahaan Minyak Belanda di Paotere. Bahkan di perusahaan ini, salah seorang pegawainya yang berekebangsaan Belanda dibunuh.⁵⁶ Teror dilakukan dengan maksud agar orang-orang Belanda yang masih "berkeliaran" di Makassar segera angkat kaki dan posisi-posisinya digantikan oleh orang Indonesia sendiri.

Demikianlah beberapa gerakan buruh yang penulis sempat lacak; tentunya tidak menutup kemungkinan masih banyaknya gerakan buruh yang pernah terjadi dalam skala besar dan kecil. Untuk itu, karya ini bukanlah akhir dari sebuah penelusuran tentang gerakan buruh di Makassar, tetapi baru merupakan awal untuk mencermati renik-renik masa lalu yang tidak dapat diedit. Karena penulis sadar, nuansa-nuansa masa lalu yang menghampar itu tidak akan dapat ditulis sedetail mungkin hanya dalam beberapa kajian saja.

⁵⁶H. Haneng, wawancara pada tanggal 26 Maret 1994 di Ujungpandang.

BAB IV

KESIMPULAN

Gerakan buruh di Makassar terjadi dalam situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Ketidakstabilan itu disebabkan oleh adanya keinginan pemerintah Belanda untuk tetap berkuasa di Indonesia, yang antara lain ditandai dengan "rekayasanya" yang turut melahirkan Negara Indonesia Timur (NIT).

Akan tetapi, baru dalam proses pembenahan pemerintahan dan pemulihan ekonomi yang ambruk akibat perang, NIT mulai digugat sebagai bentuk baru dari *divide-et-impera* Belanda. Selanjutnya, NIT yang sebagian kalangan menyebutnya sebagai Negara Ikut Tuan segera diberondong oleh tuntutan dari berbagai pihak yang menginginkan kembalinya Indonesia ke negara kesatuan. Dengan demikian, "atmosfir" Makassar sebagai pusat pemerintahan NIT tidak pernah sepi dari berbagai gerakan.

Jika ditarik relevansinya dengan kajian ini, maka dapat dikemukakan, bahwa pergolakan politik pada masa itu merupakan variabel yang signifikan dalam menjelaskan terjadinya berbagai gerakan buruh di Makassar. Hal itu dapat ditelusuri dari berbagai aksi yang dilakukan, seperti pemogokan, anti *overwerk*, pemasangan pamflet, dan teror.

Dari berbagai aksi tersebut, pemogokan adalah hal yang paling sering dilakukan. Pemogokan, disamping bertujuan

untuk perbaikan nasib atau kenaikan upah juga bertujuan untuk membubarkan NIT dengan jalan melumpuhkan pusat-pusat perekonomian Belanda yang sekaligus merupakan sumber pendapatan bagi NIT.

Pemogokan yang banyak dipelopori oleh Badan Perdjooangan Buruh (BPB) dimulai pada tahun 1949 dan memuncak pada tahun 1950 dengan melibatkan puluhan ribu buruh. Pemogokan banyak dipusatkan di pelabuhan, karena pada tempat itulah beroperasi kapal-kapal Belanda yang bernaung di bawah perusahaan-perusahaan besar seperti KPM. Kapal-kapal tersebut merupakan pemasok senjata bagi Belanda dan NIT, di samping untuk mengangkut barang-barang ekspor seperti kopra dan rotan serta barang-barang lainnya.

Pemogokan yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama mengakibatkan arus bongkar muat barang macet. Akibatnya, tidak ada pilihan lain bagi perusahaan, kecuali harus memenuhi sebagian besar tuntutan buruh. Kalau tidak ada kesepakatan, maka pemerintah NIT turun tangan.

Pemogokan yang dipergunakan oleh buruh sebagai *bargaining-weapon* (senjata-tawar menawar) dalam memenuhiuntutannya, selain dilakukan oleh buruh-buruh pelabuhan, juga oleh buruh-buruh lain, seperti buruh pelelangan ikan.

Setelah NIT bubar, pemogokan yang melibatkan puluhan ribu buruh tidak lagi seramai dibanding sebelum NIT bubar. Namun demikian, buruh tetap berurusan dengan orang-orang

Belanda, karena baru pada akhir tahun 1957 pemerintah Indonesia mengambil alih KPM dan perusahaan-perusahaan lainnya. Oleh karena itu, gerakan seperti pemogokan, anti overwerk, dan teror masih tetap dilancarkan, walaupun dalam skala yang kecil.

Sementara itu, terdapat ratusan organisasi-organisasi buruh yang tergabung dalam berbagai vakcentrale, baik yang bersifat lokal maupun cabang dari organisasi yang berpusat di Jakarta. Akibatnya, persaingan untuk memperebutkan anggota berlangsung dengan "ketat", seperti yang ditunjukkan dalam kasus Sarekat Buruh Pelajan Indonesia (SBPI) yang hendak keluar dari BPB untuk selanjutnya bergabung dengan GOBI. Kondisi tersebut diperburuk oleh adanya usaha partai-partai politik yang menjadikan buruh sebagai salah satu basis pengembangan partainya. Dengan demikian, organisasi buruh tidak hanya berhadapan dengan perusahaan, tetapi juga dengan sesama organisasi buruh.

DAFTAR BACAAN

I. Sumber-sumber Arsip

Arsip Nasional Perwakilan Sulawesi Selatan. Arsip Pemerintahan Indonesia Timur 1946-1950. Nomor Reg. 126, 1291, 152, 153.

Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi 1950-1960. Nomor Reg. 221.

Arsip Pribadi H.A.R. Tamma. Nomor Reg. 536, 543, 544, 546, 547.

II. Buku, Makalah, dan Artikel

Abd. Razak Daeng Patunru, *Sedjarah Gowa* (Makassar: Jajasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1967).

Agung, Ide Anak Agung Gde, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985).

Almond, A. Gabriel, "Kelompok Kepentingan dan Partai Politik" dalam: Mochtar Maso'ed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978).

Arfa, Man, "Partisipasi Buruh Pelabuhan Makassar Dalam Perjalanan Sejarah Sulawesi Selatan 1945-1973" (Ujungpandang: Skripsi pada Fak. Sastra Universitas Hasanuddin, 1990).

Bachri, Syamsul, "Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Buruh: Suatu Telaah Sosio-Yuridis Tentang Penyelesaian Kasus Perburuhan di Kodya Surabaya" (Surabaya: Tesis pada Fakultas Pasca Sarjana Unair, 1989).

Feith, Herbert dan Lance Casles, (ed.), *Peikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1988).

Garraghan, J. Gilbert, "The Integrity of Sources, Textual Criticism" dalam: *A Guide To Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957). Tugas Mata Kuliah Metodologi Sejarah oleh M. Nur (Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1989).

- , "Mechanical Aids To Research" dalam: *A Guide To Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957). Tugas Mata Kuliah Metodologi Sejarah oleh Ni Nyoman Sudewi (Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1989).
- Gazalba, Sidi, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1981).
- Gonggong, Anhar, *Abdul Gahhar Mudzakkars: Dari Patriot Hingga Pembontak* (Jakarta: Grasindo, 1992).
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah* (Terjemahan: Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Hadiz, Vedi R, "Perkembangan Perburuhan Belakangan Ini". *Kompas* (Sabtu, 14 September 1991).
- Hamid, Abu, "Melestarikan Kebahariawan Masyarakat Sulawesi Selatan (Suatu Tinjauan Antropologi Sosial)". *LONTARA XXVIII* (1990 No. 37), hal. 38-45.
- Harvey, Barbara Sillars, *Pembontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989).
- , *Perwasta: Pembontakan Setengah Hati* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989).
- Hidding, K.A.H. dan T.S.G. Mulia, *Ensiklopedi Indonesia* (Bandung: w.van Hoeve Bandung.'s-Gravenhage, /t.th./).
- Ibrahim, Muhd. Yusof, *Pengertian Sejarah: Beberapa Perbahasan Mengenai Teori dan Kaedah* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajar Malaysia, 1986).
- I. N., Soebagija, *Sudiro Pejuang Tanpa Henti* (Jakarta: Gunung Agung, 1981).
- Kadir, Harun, et.al., *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan* (Ujungpandang: Depdikbud, 1978).
- Kaisepo, Manuel, "Mitos Kerja". *Prisma X* (Mei 1981, Nomor 5), hal. 2.
- Kansil, C.S.T. dan Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1990).

- Kartodirdjo, Sartono, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen" dalam: Koentjaraningrat (ed.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia: 1985).
- , *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Kementerian Penerangan, Republik Indonesia *Pro Sulawesi* (Jakarta?: Departemen Penerangan, 1973).
- Kuntowijoyo, *Perjuangan Petani* (Yogyakarta: Benteng Interwisi Utama, 1993).
- Limbugau, Daud, "Perjalanan Sejarah Kota Makassar Abad 19-20" dalam: Mukhlis (ed.), *Persepsi Sejarah Kawasan Pantai* (Ujungpandang: P3MP, UNHAS-YIIS, 1989).
- Mandalangi, J. Pareira, "Aspek-aspek Internasional dan Nasional dari Hak Mogok". *Pro Justitia IX* (Oktober 1991 Nomor 4), hal. 3-26.
- Masduki, Teten, Arah Menuju Reformasi Politik Perburuhan. *Kompas* (Senin 19 April 1993).
- Maskum, et.al., *Lubang-Lubang Pembantaian. Petualangan PKI di Madiun* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990).
- Mattulada, "Manajemen Tradisional Dalam Kalangan Usahawan Orang Bugis-Makassar" dalam: Mukhlis, *Dinamika Bugis-Makassar* (Ujungpandang: PLPIIS-YIS, 1986).
- , *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah* (Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1991).
- Mukhlis, et.al., *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan: Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900-1950* (Jakarta: Depdikbud, 1984/1985).
- Nalle, Mathoes, "Pemogokan dan Penangkalannya" dalam: *SUARA PEMBARUAN* (Selasa, 22 Februari 1994).
- Poelinggomang, Edward L., "Proteksi dan Perdagangan Bebas: Kajian Tentang Perdagangan Makassar Abad ke-19". (Amsterdam: Disertasi pada Vrije Universiteit, 1991).

- , Edward L., "Sumber dan Kritik Sumber". (Ujungpandang: Makalah yang disampaikan Pada Pelatihan Metodologi Sejarah yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Sejarah (KSS) Fakultas Sastra Unhas, pada tanggal 20 Juni 1992).
- Poole, Ross, *Moralitas dan Modernitas Di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme* (Yogyakarta: Kanisius, 1993).
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991).
- Rifai, Eddy, "Eksplotasi Buruh Sebagai Kejahatan White Collar" dalam: *Kompas* (Senin, 21 Oktober 1991).
- Russel, Bertrand, *Kekuasaan: Sebuah Analisis Sosial Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988).
- S, Alden Tua dan Rekson Silaban, "Perlukah Pluralisme Buruh?", *Suara Pembaruan* (Rabu 14 April 1993).
- Sandra, *Menjengkap Dunia Modern. Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia* (Jakarta: Pustaka Rakjat, 1961).
- Sarwo, "Pelabuhan Makassar Sebagai Pintu Gerbang Kota" dalam: Sikado Dg. Nai, et.al., *Kenangan 50 Tahun Berotonomi Kota Makassar* (Makassar" /t.p./: 1957?).
- Sastrosatomo, Soebadio, *Perjuangan Revolusi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1987).
- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), *Guntingan Koran dan Majalah Tentang Perburuhan, PROBLEMA* (1993, No. 4).
- Setiawidi, Bingar dan Bondan Kanumayasa, "Benteng, Ekonomi, dan Politik: Tinjauan Tentang Politik Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal". (Ujungpandang: Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mahasiswa Sejarah IV dan Munas I FORKOMASA di Unhas, 27-31 Juli 1993).
- Sills, David L, (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, volume 8 (New: York: The Macmillan Company & The Free Press, 1972).
- Sikado, Dg. Nai, et.al., *Kenangan 50 Tahun Berotonomi Daerah Kota Makassar* (Makassar: /t.p./: 1957 ?).

Soepomo, Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Jambatan, 1987).

Sritimuryati, "Peristiwa Andi Azis: Dilema Fedraalis dan Unitaris" (Ujungpandang: Skripsi pada Fakultas Sastra Unhas, 1986).

Sudono, Agus, *Sedjarah Kelahiran dan Perkembangan FBSI* (Jakarta: DPP-FBSI, 1979).

Sulistyo, Bambang, "Pemogokan Buruh Pabrik Gula Di Jawa Pada Masa Kolonial 1918-1920" (Yogyakarta: Tesis pada Universitas Gadjah Mada, 1991).

/t.p./, *Marsinah: Buruh Kecil Korban Pembunuhan Karena Menuntut Perbaikan Nasib* (Surabaya: Surabaya Metropolis Pers, 1993).

Tobing, Ph.D.L., *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Aænna Gappa* (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1961).

Utomo, Joko, "Pemogokan Buruh Tani di Abad ke-19: Kasus Yogyakarta" dalam: *PRISMA XII* (1993, No. 8).

III. Surat Kabar dan Majalah

Dinihari, 21, 23, 26 dan 30 Januar 1950; 29 Oktober 1951

Editor, 3 Juli 1993

Marhaen, 14 Januari 1955

Pedoman Rakjat, 17 Januari; 20 dan 28 September 1955

Prisma, Januari 1992

Suara BPB, 15 Desember 1953

Timbangan, 15 Maret 1955

Tinjauan, 2 Maret 1954; 6 Agustus 1955

IV. Wawancara

H. Haneng, tanggal 26 dan 30 Maret 1994 di Ujungpandang. Beliau adalah mantan Ketua Badan Perdjolongan Buruh (BPB) Makassar.